



**LAPORAN AKTUALISASI  
MADURATU  
PEMBUATAN DUMMY RANCANGAN SITUS MUSEUM**

Disusun Oleh:

Nama : Nur Sa'ban Alif Abyan  
NIP : 19961225 201903 1 001  
Instansi : Bidang Arsip dan Museum

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2019**



## **LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI**

MADU RATU

## PEMBUATAN DUMMY RANCANGAN SITUS MUSEUM

Disusun Oleh:

**Nama** : Nur Sa'ban Alif Abyan  
**NIP** : 19961225 201903 1 001  
**Instansi** : Bidang Arsip dan Museum

PesertaDiklat.

Am

(Nur Sa'ban Alf Abyan, S. Hum.)  
19961225 201903 1 001

Menyetujui  
Mentor

mentor

(Endang Suryastuti, S.H., M.Si.)  
19690801 1994032 001

*Coach,*

) (Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.)  
19780328 201001 2 012



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

MADU RATU

### PEMBUATAN DUMMY RANCANGAN SITUS MUSEUM

Disusun Oleh:

Nama : Nur Sa'ban Alif Abyan  
NIP : 19961225 201903 1 001  
Instansi : Bidang Arsip dan Museum

PesertaDiklat,

(Nur Sa'ban Alif Abyan, S. Hum.)  
19961225 201903 1001

Menyetujui  
Mentor,

(Endang Suryastuti, S.H., M.Si.) (Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.)  
19690801 199403 2 001 19780328 201001 2 012

Coach,

## Daftar Isi

<b>BAB I .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	1
<b>BAB II .....</b>	3
A. Visi Misi Unit Kerja .....	3
B. Struktur Organisasi .....	5
C. Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	5
<b>BAB III .....</b>	9
A. Identifikasi Isu .....	9
1. Minimnya benda koleksi museum sebagai dasar untuk pengembangan dan pengkajian museum .....	9
2. Kurang efektifnya pameran sementara Museum DPR kepada masyarakat.....	10
3. Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat .....	11
B. Pemilihan Isu Prioritas.....	13
C. Gagasan Pemecahan Isu .....	13
D. Rancangan Aktualisasi.....	14
<b>BAB IV .....</b>	19
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi .....	19
B. Stakeholder .....	25
C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala.....	26
D. Analisis Dampak.....	26
1. Hasil Inisiatif .....	26
2. Nilai Dasar ANEKA .....	27
E. Jadwal Kegiatan .....	28
<b>BAB V .....</b>	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran .....	30
Lampiran Kegiatan I-VI.....	31
Kegiatan I .....	31
Kegiatan II .....	33

<b>Kegiatan III .....</b>	34
<b>Kegiatan IV.....</b>	35
<b>Kegiatan V.....</b>	37
<b>Kegiatan VI.....</b>	41
<b>Lampiran Konsultasi dengan Coach .....</b>	42
<b>Lampiran Database Anggota KNIP .....</b>	44
<b>Lampiran Sejarah KNIP dan Sejarah Museum .....</b>	65
<b>Lampiran Tampilan Situs Dummy Museum .....</b>	71
<b>Lampiran Desain Pameran Kota Tua .....</b>	78

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha dalam penyelenggaraan negara yang profesional dan berkualitas dimulai dengan perekrutan Aparatur Sipil Negara melalui jalur yang bersih, transparan, dan tanpa adanya praktik KKN. Namun, hal ini pun belum cukup untuk meningkatkan performa pelaksanaan dan pelayanan negara. CPNS yang berhasil melalui proses perekrutan ini harus ikut melalui masa percobaan serta menjalani proses pelatihan terintegrasi untuk membangun individu yang mempunyai integritas moral, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Untuk itu, diperlukan sebuah pelatihan terintegrasi dan inovatif yang menyatukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal baik di tempat kerja maupun di tempat pelatihan. Pelatihan Dasar CPNS yang muncul setelah diperkenalkannya UU ASN adalah medium untuk membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *Whole of Government* untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dimana segala sesuatu mulai masuk dunia digital.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Negara Nomor 9 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya.

## **BAB II**

### **Profil Organisasi**

#### A. Visi Misi Unit Kerja

Tempat Unit Kerja saya mengabdi adalah Pusat data dan Informasi (Pusdatin). Tugas dan fungsi Pusdatin yang diatur dalam Pasal 275 dan Pasal 276 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan DPR RI, serta Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016-2019. Tugas Pusdatin adalah memberikan pelayanan perpustakaan bagi pengguna yang dilaksanakan oleh Bidang Perpustakaan, mengolah data dan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi, kegiatan pengelolaan karsipan dan museum yang dilaksanakan oleh Bidang Arsip dan Museum.

Fungsi Pusat Data dan Informasi diantaranya yaitu:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan Informasi
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan Informasi
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat data dan Informasi
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi
- e. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pengarsipan, dan risalah rapat
- f. Pengelolaan perpustakaan

- g. Pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)
- h. Pengelolaan kearsipan dan museum
- i. Pengelolaan risalah rapat DPR RI
- j. Pelaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal
- k. Penyusunan laporan kinerja Pusdatin dan
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal

Pada penjabaran singkat mengenai tugas dan fungsi Pusdatin, visi dan misi pelaksanaan kegiatan Pusdatin mengarah pada tujuan serta mendukung fungsi Setjen dan BK DPR RI. Dengan demikian, Pusdatin memiliki Visi yaitu "*Menjadi Pusat Pelayanan Data dan Informasi yang Cepat, Akurat, Relevan, Up To Date dan terintegrasi*". Visi tersebut merupakan harapan dari keberadaan Pusdatin sebagai bagian dari unit kerja yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan di DPR RI.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, keberadaan Pusdatin diharapkan dapat melayani dan memberikan informasi yang Cepat, Akurat, Relevan, *Up To Date* dan terintegrasi baik untuk kebutuhan anggota maupun khalayak yang turut serta mendukung keberadaan DPR RI.

Agar terlaksananya visi yang di telah dirumuskan oleh Pusdatin, diperlukan penetapan yang menjadi misi dari Pusdatin sebagai kegiatan yang diemban. Misi Pusdatin yaitu:

- a. Memberi arahan, mengkoordinir dan mengawasi pelayanan data dan informasi kepada anggota dewan dan stakeholder lainnya
- b. Menyediakan dan melayani bagi pengguna yang memanfaatkan perpustakaan secara lengkap, relevan, dan up to date dan mudah diakses

- c. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan komunikasi data yang andal dan aman
- d. Menyediakan arsip/dokumen mengenai DPR RI ataupun yang berkenaan dengan Setjen DPR RI serta sejarah perkembangan mengenai kedewanan secara lengkap, otentik dan terpelihara

#### B. Struktur Organisasi



Pamong Budaya Ahli Pertama masuk dalam kelompok Jabatan Fungsional yang ada dalam bagian Pusat Data dan Informasi. Namun dalam penempatan kerjanya berada dalam Bidang Arsip dan Museum.

#### C. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Saya dalam melakukan kegiatan dalam lingkungan Setjen dan BKDPR RI tentu tidak bisa melakukannya dengan bebas tanpa pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Karena saya merupakan Pamong Budaya Ahli Pertama, yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan, tentunya perlu penjelasan lebih lanjut tentang ini dalam

Bagian selanjutnya. Saya sebagai pemangku jabatan fungsional Pamong Budaya Ahli Pertama terikat dengan standar kompetensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional Pamong Budaya yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008. Sesuai Pasal 4, Tugas pokok Pamong Budaya adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan. Sesuai Pasal 6 yang berhubungan dengan Museum DPR RI, unsur dan sub unsur kegiatan Pamong Budaya dalam pembinaan permuseuman, antara lain:

- Pengelolaan koleksi;
- Perencanaan koleksi;
- Pelestarian koleksi;
- Identifikasi koleksi;
- Penyajian koleksi; dan
- Penyebarluasan informasi permuseuman.

Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat melakukan pengembangan profesi sesuai Pasal 6 poin 8, meliputi:

- Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;
- Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;
- Penyusunan pedoman di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan; dan
- Pemberian konsultasi kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;

Selain itu, terdapat pula tugas penunjang Pamong Budaya sesuai Pasal 6 poin 9, antara lain:

- Pengajar dan/atau pelatih di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;
- Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;
- Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan;
- Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
- Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Jabatan Fungsional Pamong Budaya tingkat Ahli memiliki jenjang jabatan dari terendah sampai tertinggi. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Jabatan Fungsional Pamong Budaya tingkat Ahli, terdiri dari:

1. Pamong Budaya Pertama;
2. Pamong Budaya Muda;
3. Pamong Budaya Madya.

Untuk rincian kegiatan Pamong Budaya Ahli Pertama di bidang permuseuman, sesuai Pasal 9 Ayat (7) Poin a, terdiri atas:

1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan permuseuman (yang belum tercantum);
2. Menilai benda calon koleksi; dan
3. Merestorasi koleksi.

Namun, karena kurangnya tenaga yang ada di Museum DPR RI, saya ikut menyertakan rincian kegiatan Pamong Budaya Muda dan Pamong Budaya Madya karena beberapa dilakukan oleh

saya yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (7) poin b dan c, yang terdiri dari

Pamong Budaya Muda

1. Melakukan Konservasi Koleksi;
2. Membuat replika koleksi;
3. Melakukan penelitian koleksi;
4. Menyusun materi pameran; materi koleksi;
5. Membuat naskah film/video/CD ROM/homepage tentang museum;
6. Melakukan penyuluhan tentang museum;

Pamong Budaya Madya

1. Menyusun pedoman perawatan dan pendokumentasian koleksi;
2. Membuat visual rekaman koleksi
3. Menganalisis data koleksi
4. Mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pameran sebagai koordinator;
5. Menyusun naskah informasi dan publikasi museum;

## **BAB III**

### **Rancangan Aktualisasi**

#### **A. Identifikasi Isu**

1. Minimnya benda koleksi museum sebagai dasar untuk pengembangan dan pengkajian museum

Museum dalam menjalankan kinerjanya tidak terlepas dari benda koleksi yang berhubungan dengan tema/intansi terkait. Museum DPR RI dalam menjalankan UU No. 11 tahun 2010 Pasal 18 memerlukan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Museum DPR RI sendiri sudah memiliki beberapa Benda Cagar Budaya atau dalam bahasa yang mudah dipahami sebagai benda koleksi museum, seperti Mesin Tik yang digunakan dalam sidang Konstituante 1956-1959 di Bandung, Palu yang digunakan oleh Ketua DPR Idham Chalid (1971) hingga tahun 1997, dan beberapa benda koleksi lainnya yang sifatnya representatif DPR RI sebagai lembaga. Museum DPR RI masih kekurangan benda koleksi pribadi yang dibutuhkan untuk pelengkap materi koleksi, hingga menjadi kajian untuk museum kedepannya. Jika dilakukan, ini akan mempermudah Museum DPR RI dalam melakukan perubahan konten pameran, baik tetap maupun sementara.

Dampak jika penambahan koleksi tidak dilakukan, ini akan menghambat pengembangan Museum DPR dan berkurangnya daya tarik museum bagi orang yang sudah berkunjung. Selain itu, kegiatan ini termasuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik karena salah satu tujuan dari Museum adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2. Kurang efektifnya pameran sementara Museum DPR kepada masyarakat

Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sekarang yang sudah mengenal teknologi, kadang penyampaian informasi melalui panel yang disediakan dan materi yang disampaikan oleh pelantang oleh edukator museum kurang menarik perhatian lagi. Remaja-remaja lebih memilih untuk menggunakan gawainya untuk mengambil foto informasi yang tersedia di panel. Ditambah lagi, informasi yang tersedia terbatas karena kecilnya panel yang tersedia sehingga untuk penyampaian informasi dilakukan oleh edukator. Belum lagi beberapa pengunjung tidak tertarik mendengarkan orang berbicara.

Pada Pameran Bersama di Boyolali, ketika kami dari pengelola Museum DPR RI mencoba menggunakan Kahoot! yaitu merupakan alat kuis digital yang melibatkan pengunjung dengan menggunakan gawainya untuk ikut kuis seputar serba-serbi Museum DPR RI, respon yang diberikan remaja-remaja hingga pengunjung lainnya pun positif, walaupun hadiah yang diberikan bervariasi, mulai dari *blocknotes*, pulpen, gantungan kunci. Penggunaan teknologi ini sesuai dengan PP No. 66 tahun 2015 Pasal 42 ayat (c) mengenai pemberian penyuluhan Museum dan Koleksi. Kedepannya, kuis Kahoot! ini bisa digunakan sebagai salah satu sarana tambahan bagi Museum DPR RI untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media interaktif. Kurang efektifnya juga terdapat pada penuhnya booth oleh koleksi serta panel yang tidak sesuai dengan tinggi target yang banyak dari mereka merupakan anak kecil. Selain itu, Dalam keterkaitan materi, Isu ini bisa dikaitkan dengan Pelayanan Publik dan Komitmen Mutu dalam hal inovasi penyampaian informasi.

Jika ini tidak dilakukan, ada kemungkinan daya tarik Museum DPR RI saat pameran sementara maupun tetap akan berkurang dan kurang menarik bagi generasi kekinian.

3. Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat

Berkembangnya era keterbukaan informasi dan zaman digital ini merupakan sebuah tantangan yang pasti dihadapi oleh semua elemen di masyarakat, tidak terkecuali museum. Masuknya manusia ke era revolusi industri 4.0 dan digital telah mempengaruhi bagaimana manusia, khususnya pengunjung museum "mengunjungi" museum. Ketika pengurus Museum harus menghadapi keadaan "harus digital", penyediaan informasi online kepada pengunjung juga menjadi salah satu pekerjaan dari pengelola Museum (Marty, 2008). Meningkatnya penggunaan internet dari hari kehari telah menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola museum. Hal ini justru bisa dimanfaatkan Museum DPR RI sebagai sarana untuk menyampaikan informasi melalui platform digital, yaitu sebuah situs resmi dari Museum DPR RI itu sendiri. Namun, kegunaan sebuah situs tidak hanya itu, melainkan bisa menjadi sebuah wadah penerapan teknologi interaktif yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan koleksi museum dan melihat museum tanpa mengunjungi museum (Ambrose, 2006). Memang dalam situs dpr.go.id sendiri sudah ada sebuah halaman mengenai sejarah terbentuknya DPR RI, namun informasi yang disampaikan ini singkat dan tidak menceritakan bagaimana perkembangan DPR setelah masa KNIP. Kerangka situs Museum DPR RI sendiri sudah ada yaitu di alamat newmuseum.dpr.go.id, namun situs itu masih minim konten museumnya dan hanya menyiapkan rumah bagi Museum kedepannya.

Konten yang akan disampaikan dalam situs Museum DPR RI ini akan mencakup sejarah DPR RI, koleksi museum, hingga daftar Anggota DPR dari masa KNIP hingga periode 2014-2019. Daftar Anggota DPR dari tahun 1945 hingga periode 2014-2019 ini nantinya bisa digunakan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan kelestarian museum sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2015 mengenai Museum Pasal 1 ayat (13) mengenai Pengkajian Museum dan Pasal 34 ayat (2) mengenai kewajiban Pengkajian Museum oleh pengelola museum. Dampak dari daftar anggota ini akan besar jika dilakukan mengingat pembaharuan konten untuk museum akan dipermudah. Selain materi utama tersebut, akan disertakan juga games kahoot sebagai fitur sampingan situs museum. Diharapkan situs ini akan menjadi salah satu media penyampaian informasi digital yang bisa dikunjungi oleh semua orang tanpa mendatangi lokasi fisiknya.

Jika tidak ada situs, kesempatan Museum DPR untuk ikut dalam arus globalisasi dan era digital akan terhambat. Selain itu, penyampaian informasi tanpa batas kepada masyarakat akan terhalang oleh waktu dan tempat karena memaksa masyarakat untuk datang ke lokasi fisik Museum DPR. Dalam materi Agenda III, pembuatan situs Museum DPR RI ini akan menjalankan nilai Pelayanan Publik dan Manajemen ASN.

Namun, karena situs Museum DPR sudah ada dan dibuat oleh BDTI, tetapi masih dalam keadaan kosong dan perlu melalui proses penyelesaian baik secara administratif dan birokratif. Maka saya akan membuat *dummy* situs Museum DPR RI.

## B. Pemilihan Isu Prioritas

Pemilihan Isu yang Prioritas menggunakan teknik analisis Urgency, Serious, Growth

No.	Isu	U	S	G	Jumlah
1.	Minimnya benda koleksi museum sebagai dasar untuk pengembangan dan pengkajian museum	3	4	4	11
2.	Kurang efektifnya pameran sementara Museum DPR	2	3	4	9
3.	Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat	4	4	4	12

Berdasarkan teknik USG diatas, dipilihlah isu ketiga, yaitu Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR RI sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat

## C. Gagasan Pemecahan Isu

Setelah melalui proses analisis USG, isu yang penting saat ini adalah optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pembuatan dummy rancangan situs.

#### D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	Bidang Arsip dan Museum
Identifikasi Isu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimnya benda koleksi museum sebagai dasar untuk pengembangan dan pengkajian museum.</li><li>2. Kurang efektifnya pameran sementara Museum DPR kepada masyarakat.</li><li>3. Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat</li></ol>
Isu yang diangkat	Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat
Gagasan pemecahan isu	Optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pembuatan dummy rancangan situs.

Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterkaitan dengan substansi materi pelatihan	Kontribusi terhadap visi misi organisasi	Penguatan nilai organisasi
1. Konsultasi dengan pembimbing, coach, serta rekan sejawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Konsultasi dengan pembimbing, coach mengenai konten dari situs</li> <li>-Konsultasi dengan rekan sejawat mengenai konten situs</li> </ul>	Laporan draft rancangan dummy situs	<p>Dalam memulai sebuah aktualisasi, perlu dilakukan konsultasi dengan pembimbing dan rekan sejawat dengan menerapkan sopan santun mengenai isi dari situs. (<b>Etika Publik</b>) Selain itu, dalam konsultasi dengan rekan sejawat saya tidak pandang bulu. (<b>Nasionalisme</b>). Efisiensi rentang waktu sejarah (<b>Komitmen Mutu</b>)</p>	<p>Dengan melakukan konsultasi untuk perancangan dummy situs ini bisa berkontribusi terhadap Visi Pusdatin yaitu Menjadi Pusat Pelayanan Data dan Informasi yang Cepat, Akurat, Relevan, Up to Date dan terintegrasi</p>	<p>Konsultasi dengan mentor dan Rekan Sejawat secara tidak langsung telah melaksanakan nilai dalam agama yaitu melaksanakan silaturahmi dengan saudara kita. (<b>Religius</b>)</p>
2. Pembuatan Kerangka Situs Dummy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan dummy situs menggunakan wordpress atau blogspot</li> <li>- Melakukan Konsultasi dengan rekan di BDTI</li> <li>- Pelaporan template situs kepada pembimbing</li> </ul>	Kerangka draft dummy situs yang masih kosong	<p>Membuat situs memerlukan proses kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi. (<b>Komitmen Mutu</b>) Selain itu ketika template situs sudah jadi pun kita perlu melaporkan dan mendiskusikan kembali dengan pembimbing. (<b>Etika Publik</b>). Rancangan ini</p>	<p>Pembuatan dummy untuk kerangka situs musuem secara langsung telah menjalankan misi Pusdatin yaitu Menyediakan arsip/dokumen mengenai DPR RI ataupun yang berkenaan dengan Setjen DPR RI serta sejarah perkembangan mengenai</p>	<p>Pembuatan dummy situs harus dilakukan secara profesional sehingga memperlihatkan kinerja Bidang Arsip dan Museum secara keseluruhan. (<b>Profesional</b>)</p>

			merupakan salah satu bentuk pengembangan dan pengkajian museum ( <b>Akuntabilitas</b> )( <b>Manajemen ASN</b> ).	kedewanan secara lengkap, otentik dan terpelihara.	
3. Pengumpulan data untuk konten situs yang melliputi Sejarah DPR, Foto-foto sesuai periode DPR hingga tahun 1971, foto koleksi 5 buah hingga daftar anggota dari periode KNIP hingga 2014-2019 <sup>1</sup>	- Pengumpulan data untuk halaman sejarah dpr - Pengumpulan data foto untuk halaman galeri - Pengumpulan data untuk halaman anggota DPR RI - Pembuatan draft hasil pengumpulan data	Kumpulan data yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk dokumen digital Seperti Excel, PDF, dan Word	Pengumpulan data harus dilakukan dengan konsisten dan data yang ada ini nantinya juga menjalankan sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2015 mengenai Museum Pasal 1 ayat (13) mengenai Pengkajian Museum dan Pasal 34 ayat (2) mengenai kewajiban Pengkajian Museum oleh pengelola museum ( <b>Akuntabilitas</b> ) Data yang terkumpul harus bisa dijamin keasliannya serta tidak adanya kesalahan dalam pengumpulan ( <b>Komitmen Mutu</b> )	Pengumpulan data untuk pengembangan dummy situs ini secara langsung telah menjalankan misi Pusdatin yaitu Menyediakan arsip/dokumen mengenai DPR RI ataupun yang berkenaan dengan Setjen DPR RI serta sejarah perkembangan mengenai kedewanan secara lengkap, otentik dan terpelihara	Data yang dikumpulkan harus bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasna sehingga tidak mencoreng nama organisasi. <b>(Akuntabilitas)</b>

<sup>1</sup> Perubahan= Sejarah DPR dan database anggota difokuskan saja ke KNIP, untuk foto periode hingga tahun 1971 sudah terlaksana

4. Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan data yang terkumpul</li> <li>- Konsultasi dengan teman sejawat</li> <li>- Menjelaskan hasil pengolahan dan menulis draft yang dimasukkan ke situs dummy</li> </ul>	<p>Draft dummy berbentuk artikel yang sudah dimasukan kedalam situs dummy</p>	<p>Hasil dari pengolahan data ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi sejarah dan netral dalam menyampaikan dan mengolah informasi yang ada(<b>Akuntabilitas</b>) (<b>Nasionalisme</b>). Penulisan harus mengikuti kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. (<b>Etika Publik</b>) Dalam menulis artikel perlu menjaga kualitas dan harus berorientasi kepada hasil akhir yang bermutu baik, serta hasil yang tayang dalam dummy situs bisa diakses oleh publik (<b>Komitmen Mutu</b>)(<b>Pelayanan Publik</b>).</p>	<p>Dalam mengolah dan menganalisis data yang terkumpul ini telah menjalankan misi Pusdatin yaitu Menyediakan arsip/dokumen mengenai DPR RI ataupun yang berkenaan dengan Setjen DPR RI serta sejarah perkembangan mengenai kedewanan secara lengkap, otentik dan terpelihara</p>	<p>Pengolahan hingga penulisan yang harus dilakukan dengan profesional dengan menjaga kualitas data yang telah berhasil dikumpulkan. <b>(Profesional)</b></p>
5. Uji Coba Situs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat indikator surveri mengenai situs dummy</li> </ul>	<p>Laporan hasil umpan balik</p>	<p>Dalam melakukan uji coba, saya mengujicobakannya ke rekan sejawat tanpa adanya</p>	<p>Uji Coba untuk pengembangan dummy situs ini secara langsung</p>	<p>Uji coba kepada rekan sejawat ini merupakan salah satu bentuk nilai</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan uji coba kepada teman sejawat di Bidang Arsip dan Museum, beberapa rekan di bidang lain serta teman saya diluar ruang lingkup DPR RI</li> <li>- Mencatat umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat</li> </ul>		<p>diskriminasi.</p> <p><b>(Nasionalisme).</b> Umpan Balik yang dierima pun bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari situs dummy <b>(Komitmen Mutu)</b> Selain itu, dalam menguji coba pun harus izin dengan sopan dan santun <b>(Etika Publik)</b> Tidak memberikan hadiah kepada orang yang telah uji coba situs <b>(Anti-Korupsi)</b></p>	<p>telah menjalankan misi Pusdatin yaitu Menyediakan arsip/dokumen mengenai DPR RI ataupun yang berkenaan dengan Setjen DPR RI serta sejarah perkembangan mengenai kedewanan secara lengkap, otentik dan terpelihara</p>	<p><b>Religius</b>, yaitu menjaga silaturahmi dengan saudara. Selain itu, dalam meminta umpan balik saya akan meminta komentar yang jujur dari rekan entah itu baik maupun buruk <b>(Integritas)</b></p>
6. Konsultasi dengan Mentor dan Coach untuk laporan akhir hasil aktualisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dengan pembimbing untuk pengajuan evaluasi akhir</li> <li>- Konsultasi dengan coach untuk pengajuan evaluasi akhir</li> </ul>	Dummy situs Museum DPR RI	<p>Setelah aktualisasi siap di evaluasi akhirpun kita perlu berkonsultasi kepada mentor dan coach dengan menerapkan sopan santun untuk menjaga kualitas dari hasil yang kita kerjakan serta dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>(Etika Publik), (Akuntabilitas), (Komitmen Mutu)</b></p>	<p>Pelaporan ketika laporan aktualisasi sudah siap di evaluasi merupakan sebuah kewajiban dan harus tepat waktu sehingga ini menjalankan visi Pusdatin Menjadi Pusat Pelayanan Data dan Informasi yang Cepat, Akurat, Relevan, Up to Date dan terintegrasi</p>	<p>Dalam melakukan konsultasi baik dari awal hingga akhir ini memerlukan koordinasi yang berkelanjutan secara profesional dan menjalin silaturahmi dengan saudara <b>(Religius)</b></p>

## BAB IV

### Pelaksanaan Aktualisasi

#### A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

##### Kegiatan I

Konsultasi dengan pembimbing serta rekan sejawat mengenai konten situs.

Kegiatan awal ini sebenarnya dimulai dari akhir bulan Agustus. Saya melakukan konseling dengan mentor melalui aplikasi yang ada di gawai saya yaitu Whatsapp. Dalam proses ini saya menerapkan sopan santun dalam berhubungan (**Etika Publik**). Proses konseling berlangsung berselang-seling waktunya karena adanya kegiatan yang dilakukan baik dari saya maupun mentor. Ada tiga isu yang akan saya bahas untuk aktualisasi yaitu Kurangnya barang koleksi museum sebagai dasar untuk pengembangan dan pengkajian museum, kurang efektifnya penyampaian informasi mengenai Museum DPR RI kepada masyarakat saat pameran sementara, dan yang terakhir adalah Tidak adanya situs resmi dari Museum DPR sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun karena yang akan diaktualisasikan hanya satu, dimulai diskusi panjang bersama mentor untuk menentukan jalan keluar terbaik. Akhirnya terpilihlah satu isu utama yaitu rancangan situs Museum DPR RI. Dari mentor sendiri memberikan beberapa masukan mengenai konten situs. Awalnya saya ingin memasukkan beberapa konten seperti sejarah dpr, daftar anggota dari masa KNIP hingga 2014-2019, dan 5 foto koleksi museum. Namun, karena waktunya yang sedikit diperkecil lah periode yang dibutuhkan menjadi pada masa KNIP saja, baik untuk daftar anggota maupun sejarah DPR nya. (**Komitmen Mutu**)

Selain konseling dengan mentor, saya juga melakukan konsultasi dengan beberapa kawan museum saya yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus. Ini menyangkut konten yang ditampilkan

dalam museum, seperti Bima yang mengatakan ditambah halaman sejarah kompleks parlemen ini dan penambahan halaman khusus musuem virtualnya. Lalu ada Efel yang mengatakan bahwa untuk foto koleksi virtualnya kalau bisa tidak hanya kesamping tapi juga keatas. Dalam konsultasi dengan rekan ini saya mengedepankan sikap santun. (**Etika Publik**)

## Kegiatan II

### Pembuatan Kerangka Situs Dummy

Dalam kegiatan kedua saya pertama ingin memakai antara Blogspot dan Wordpress, akan tetapi, karena dukungan aplikasi pendukung seperti koleksi virtual dan museum virtual membutuhkan biaya, saya memutuskan untuk menggunakan Wixsite sebagai tempat merancang situs saya karena mudah digunakan dan mempunyai aplikasi yang mendukung rencana saya (**Komitmen Mutu**). Selain itu, saya juga telah melaksakan konsultasi dengan rekan BDTI dengan menerapkan sopan dan santun (**Etika Publik**), yang dilaksanakan pada tanggal 2 September bersama Sasmito dan Daniel mengenai konten situs, virtual dan database. Dari tiga produk tersebut yang membutuhkan perhatian ekstra adalah bagian virtualnya, yang mungkin membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan tersebut.

Rancangan situs ini nantinya juga bisa dijadikan pertimbangan isi konten jika situs museum benar benar diluncurkan. Saya juga telah melaporkan situs ini kepada mentor pada tanggal 28 Agustus dan mendapatkan respon positif, namun ia menekankan mengurangi periode dpr yang akan dibuat karena waktu yang tidak cukup. Sehingga dipilihlah periode KNIP sebagai fokus pembahasan saya, dan sisanya bisa dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga efisiensi dan kualitas hasil (**Komitmen Mutu**).

Selain itu, situs ini juga akan ada sebuah database yang bisa diakses dan digunakan untuk pameran pameran sementara

selanjutnya. Memang pada awalnya ini akan banyak memerlukan waktu untuk studi literasi ke perpustakaan ANRI, tapi justru ini nantinya akan memudahkan pengembangan konten museum kedepannya serta meningkatkan kapabilitas saya sebagai pamong budaya (**Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Manajemen ASN**).

### Kegiatan III

Pengumpulan data untuk konten situs yang meliputi sejarah DPR, foto-foto sesuai periode KNIP- tahun 1971(DPR GR), 5 buah foto koleksi, hingga database anggota KNIP.

Pencarian dan pengumpulan data saya lakukan di dua tempat. Pertama adalah di Record Center Bidang Arsip dan Museum, dan yang kedua adalah di perpustakaan UI tanggal 12-17 September. Di Record Center Bidang Arsip dan Museum yang terletak di basement Nusantara III, masih banyak sekali arsip dan dokumen yang bisa diselamatkan dan digunakan untuk pengembangan Armus, terutama Museum. Saya mengambil buku Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945 dan Illustrations of the Revolution: Indonesia 1945-1950. Sedangkan di Perpustakaan Indonesia saya meminjam buku dari Deliar Noer yang berjudul Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945-1950.

Selain mencari buku fisik, saya juga mencari buku elektronik yang bisa dicari di internet di minggu ke tiga dan ke empat September. Namun dalam mencari sumber sejarah ini perlu ditelaah sumber mana yang bisa dipercaya kredibilitasnya dan mana yang tidak. Salah satu sumber terpercaya adalah situs repositori kemendikbud yang bisa diakses secara terbuka. Buku yang digunakan adalah buku Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang mencakup tentang Siti Soekaptinah (51), Siti Sunaryati Sukemi (337), dan Sujatin Kartowijono (289).

Selain itu, saya juga menemukan buku yang berjudul The Asia Who is Who 3<sup>rd</sup> Edition yang mencakup tentang Asraroedin (366), Assaat (106), Djody Gondokusumo (65), Abdoel Halim (280), Burhanudin Harahap (13), Sjamsudin Sutan Makmur (88), Basjaruddin Rahman Motik (118), Sabilal Rasjad (80), Dr. Sadjarwo (422), Rasuna Said Rangkajo (476), Sardjan Mohammad (43), Sutan Sjahrir (317), Mr A A Soehardi (228), Raden Panji Suroso (344), Jusuf Wibisono (285).

Saat mengadakan kunjungan ke tempat teman saya, saya meminjam beberapa buku yang dimilikinya yaitu: Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri yang mencakup Ki Bagus Hadikusumo (11), Kasman Singodimejo (291), Fakih Oesman (18), Abdul Kahar Muzakkir (33); dan Yusuf, M Yunan, Yusron Razak, Sudarnoto Abdul Hakim (ed). 2005. Ensiklopedi Muhammadiyah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada yang mencakup Muljadi Djojomartono (32). Ki Bagus Hadikusumo (11), Abdul Karim Oei Tjen Hien (1), Usman Faqih (18).

Dalam pencarian ini memang difokuskan ke periode KNIP, namun itu bukan berarti data mengenai KNIP tidak bisa ditemukan di buku lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pergerakan yang dilakukan para tokoh pergerakan bisa dibilang berkesinambungan hingga akhir hayatnya. Banyak dari mereka yang sudah aktif dalam pergerakan di zaman Belanda meneruskan kiprah politiknya sampai setelah Indonesia merdeka. Seperti dalam buku Hasil Rakyat Memilih Tokoh-Tokoh Parlemen, mencakup Moedikdio (115), Umi Sardjono (160), Abdul Wachid Sujoso (49).

Untuk data foto ditemukan dari berbagai sumber yang bisa diakses lewat internet, seperti OPAC Perpusnas, KITLV, dan Geheugen van Nederland. Dan hasil scan dari buku Illustrations of the Revolution: Indonesia 1945-1950, serta Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pencarian data ini saya menjalankan tusi saya sebagai Pamong Budaya Ahli Pertama di bidang Permuseuman yang menjalankan PP no 66 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 13 mengenai Pengkajian Museum dan Pasal 34 ayat 2 mengenai Kewajiban Pengkajian Museum oleh pengelola museum. (**Akuntabilitas**)

#### Kegiatan IV

Pengolahan data yang terkumpul, menulis dan memasukkannya kedalam situs dummy

Pengolahan dan penulisan saya lakukan di sela-sela kesibukan kantor, seperti pada pagi hari saat sampai dikantor dan saat museum sedang tidak ada kunjungan yang dilakukan pada tanggal 16 September- 3 Oktober. Penulisan saya gunakan dengan metodologi sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama adalah heuristik di mana saya melakukan pengumpulan sumber-sumber seperti buku, artikel, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen, dan lain sebagainya mengenai tema penelitian ini baik elektronik maupun fisik. Tahapan selanjutnya adalah kritik yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern saya lakukan terhadap sumber yang sudah didapatkan dengan cara mengurangi bahan yang diluar tema yang diambil dan kritik intern dengan mempelajari sumber dan membandingkannya dengan sumber lainnya. Setelah itu saya melakukan interpretasi terhadap sumber yang sudah didapatkan. Di sini saya mencoba mengklarifikasi fakta-fakta yang sudah didapat dan melihat keterkaitan antar fakta sehingga bisa dilanjutkan dalam historiografi. Tahapan terakhir adalah penulisan kembali hasil yang didapat menjadi suatu cerita sejarah. Dalam melakukan kegiatan keempat ini saya menerapkan metodologi yang sudah diajarkan ketika saya kuliah, serta menerapkannya sebagai kompetensi yang harus dikembangkan (**Komitmen Mutu, Nasionalisme dan Akuntabilitas**)

## Kegiatan V

### Uji Coba Situs dummy

Kegiatan ini saya lakukan di tanggal 3-4 Oktober yang terdiri dari membuat indikator survei dan uji coba situs (**Komitmen Mutu**). Indikator survei dibuat tanggal 2 Oktober, dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk menilai 3 kriteria yang ada yaitu sejarah KNIP, koleksi foto, hingga database anggota KNIP. Berikut pertanyaan yang dibuat untuk mengumpulkan pendapat pengguna uji coba situs museum:

1. Bagaimana tampilan website museum secara keseluruhan?
2. Bagaimana tampilan halaman koleksi anggota KNIP?
3. Bagaimana tampilan halaman sejarah KNIP?
4. Bagaimana tampilan halaman koleksi foto DPR RI?
5. Bagaimana isi konten yang ditampilkan di setiap masing-masing halaman?
6. Berikan kesan dan saran anda

Survei sendiri dilakukan pada tanggal 4 Oktober mulai dari pagi hingga malam hari. Responden sendiri diambil secara acak namun mewakili 3 elemen yang saya targetkan dari awal, yaitu internal, bidang lain, dan diluar lingkup Sekjen dan BK DPR RI. Berikut daftar nama responden yang mengikuti uji coba tersebut.

No.	Nama	Asal Instansi
1.	Pak Mardana	Bidang Arsip dan Museum
2.	Pak Suhari	Bidang Arsip dan Museum
3.	Nala	Bidang Arsip dan Museum
4.	Arum	Bidang Arsip dan Museum
5.	Sasmito	Bidang Data dan Teknologi Informasi
6.	Daniel	Bidang Data dan Teknologi Informasi
7.	Gamal	Luar Sekjen dan BK DPR RI

Hasil Survei secara keseluruhan menyambut baik akan adanya prototype situs museum ini. Dari segi tampilan, masih banyak yang bisa di tingkatkan, seperti foto resolusi tinggi untuk halaman utama, penambahan logo, dan template situs yang terlalu putih. Untuk lebih lengkapnya akan saya tampilkan di lampiran. Selain itu, saya tidak memberikan imbalan terhadap responden (**Anti-Korupsi**). Dalam meminta waktunya untuk mengisi survei pun, saya menerapkan sopan santun (**Etika Publik**)

#### Kegiatan VI

Kegiatan terakhir adalah pelaporan kepada pembimbing dan coach. Ini dilakukan pada tanggal 4 Oktober dengan menerapkan sopan dan santun (**Etika Publik**). Pembimbing sendiri cukup mendukung terhadap prototype ini, namun beliau menekankan pentingnya ini untuk terus dilanjutkan dengan pergi ke perpustakaan dan pusat penelitian lainnya untuk kelangsungan prototype ini. Coach sendiri mengatakan bahwa walaupun masih banyak yang kurang, rancangan situs ini perlu dikembangkan dan berkesinambungan jangan sampai berhenti di masa aktualisasi saja. (**Akuntabilitas**)

#### B. Stakeholder

Pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan situs Museum DPR RI:

1. Kepala Bidang Arsip dan Museum sekaligus Mentor. Kepala Bidang Arsip dan Museum merupakan pemangku kebijakan sekaligus pembimbing di bidang substansi.
2. Coach yang merupakan pendamping sekaligus pembimbing di bidang teknis aktualisasi.
3. BDTI sebagai rekan kerja untuk berkonsultasi dalam pembuatan dummy situs
4. Teman saya sebagai wakil dari luar lingkup Sekjen dan BK DPR RI

### C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Kendala yang akan dihadapi mungkin adalah sulitnya mencari data yang ada. Mengingat salah satu data mencakup daftar Anggota DPR RI dari periode KNIP hingga periode 2014-2019. Setelah melalui konsultasi secara komprehensif dengan pembimbing, akhirnya ini dirubah menjadi ke anggota pada saat KNIP saja.

Selain itu ada kemungkinan kurangnya waktu pelaksanaan aktualisasi karena sibuknya Museum DPR RI yang setiap hari perlu melakukan pelayanan publik kepada pengunjung, apalagi pada bulan September ada pameran sementara di Magelang dan pameran sementara di Kota Tua pada bulan Oktober yang perlu menyiapkan materi dari jauh hari. Kendala ini bisa diatasi memanfaatkan waktu kosong saat tidak sedang ada pengunjung.

### D. Analisis Dampak

#### 1. Hasil Inisiatif

Kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan selama sebulan kedepan ini akan memberikan beberapa dampak bagi individu, unit kerja hingga publik yang akan dijelaskan secara detail dibawah ini

##### a. Individu

Manfaat yang didapatkan dari pembuatan dummy situs ini yang paling dasar adalah secara langsung ikut mengembangkan kompetensi dasar dari individu dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Pamong Budaya Pertama di Bidang Arsip dan Museum. Selain itu ini juga sebagai penerapan langsung dalam menjadi Pelayan Publik dengan memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan gratis.

### b. Unit Kerja

Bagi unit kerja, adanya website ini merupakan salah satu cara baru yang efisien dalam menyampaikan informasi mengenai Museum DPR RI yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Ini juga merupakan cara Museum untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman di era digital ini. Selain itu, ini juga salah satu bentuk pengembangan dan pengkajian museum dengan yang beradaptasi dengan zaman modern.

### c. Organisasi

Bagi organisasi, efek dari adanya dummy situs ini akan memberikan informasi sejarah DPR RI yang kredibel. Selain itu, ini akan meningkatkan akuntabilitas Museum DPR RI yang mewakili lembaga DPR RI sekaligus Setjen dan BK DPR RI.

## 2. Nilai Dasar ANEKA

Selama menjalankan rencana aktualisasi, tentu sebagai CPNS yang telah melaksanakan Pelatihan Dasar yang terintegrasi telah menerima pembelajaran komprehensif sistematis dan masif mengenai Sikap Bela Negara, Nilai-Nilai ASN, serta Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI. Dalam melakukan aktualisasi nanti tentu diperlukan penerapan materi-materi yang diajarkan. Nilai Akuntabilitas misalnya, dalam mengerjakan pengumpulan data hingga penulisan artikel ini perlu dilakukan sesuai dengan indikator akuntabilitas yang ada. Jika tidak, maka artikel yang dihasilkan tidak bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan ketidaknetralan, hingga inkonsistensi artikel. Untuk nilai Nasionalisme, jika tidak diterapkan ketika saya berkonsultasi pada rekan sejawat akan berakibat fatal bagi persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya serta munculnya konflik dalam unit kerja.

Penerapan Etika Publik perlu diterapkan dalam kehidupan bersosialisasi. Jika dalam berkonsultasi dengan rekan sejawat dan mentor tidak menerapkan sikap sopan santun ini akan berimbas kepada rusaknya komunikasi dan hubungan di unit kerja maupun dengan teman sejawat lainnya. Sementara jika dalam penggerjaan rancangan situs dan penulisan tidak menerapkan Komitmen Mutu, ini akan berdampak kepada hilangnya efektivitas dan efisiensi dari rancangan situs tersebut. Serta hasilnya nanti tidak bisa digunakan untuk pembangunan museum berkelanjutan. Terakhir, jika nilai Anti-Korupsi tidak diterapkan selama pelaksanaan aktualisasi akan tercermin dengan tidak menggunakan waktu kosong untuk penggerjaan aktualisasi dan memberikan hadiah kepada rekan sejawat setelah mengisi kuesioner.

#### E. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Agustus		September				Oktober	
		IV	I	II	III	IV	I		
1	Konsultasi dengan pembimbing, coach serta teman sejawat								
2	Pembuatan Kerangka Situs Dummy								
3	Pengumpulan data-data untuk konten								
4	Pengolahan data dan menulis artikel								
5	Uji Coba Situs								
6	Konsultasi akhir dengan pembimbing dan coach								

Pada Pelaksanaan terjadi pemanjangan jadwal kegiatan dikarenakan sibuknya kegiatan Museum.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Sebuah rancangan situs Museum DPR RI memang membutuhkan proses kurasi yang panjang dalam pengembangan konten yang akan ditampilkan. Namun tidak ada salahnya menjadi yang pertama untuk mengembangkan rancangan tersebut. Konten yang akan disampaikan dalam situs Museum DPR RI ini akan mencakup sejarah DPR RI, koleksi museum, hingga daftar Anggota DPR dari masa KNIP hingga periode 2014-2019. Daftar Anggota DPR dari tahun 1945 hingga periode 2014-2019 ini nantinya bisa digunakan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan kelestarian museum sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2015 mengenai Museum Pasal 1 ayat (13) mengenai Pengkajian Museum dan Pasal 34 ayat (2) mengenai kewajiban Pengkajian Museum oleh pengelola museum.

Namun, dalam kenyataan pelaksanaannya kegiatan ini harus difokuskan mengingat sedikitnya waktu yang ada. Daftar Anggota yang nantinya akan menjadi database ini difokuskan menjadi masa KNIP saja, itu pun baru beberapa yang berhasil di temukan dan di narasikan dalam rancangan situs. Sedangkan halaman sejarah DPR juga di fokuskan menjadi KNIP saja. Fokus yang dilakukan ini bukan berarti berhenti disitu saja, akan tetapi akan terus dilanjutkan karena ini merupakan kewajiban salah satu pengelolaan museum yaitu pengkajian konten museum. Ini juga salah satu bentuk jawaban dari Museum DPR RI dalam menghadapi tantangan dunia digital dimana kegiatan dan museum sendiri bisa diakses dari mana saja, serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk Museum DPR RI.

Database sendiri sudah digunakan untuk pameran sementara saat peringatan Hari Museum Nasional di Kota Tua pada tanggal

11-13 Oktober. Pameran ini mengangkat tema DPR masa lalu, yaitu pada masa Volksraad dan perempuan di masa KNIP. Ini juga salah satu kegunaan dari database anggota DPR, khususnya KNIP. Diharapkan rancangan situs ini akan terus berkembang menjadi sebuah database parlemen di Indonesia yang mumpuni.

Setiap kegiatan yang dijalankan selama aktualisasi ini tentu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dan peran serta kedudukan PNS, secara singkat, bisa diambil sebagai berikut:

Kegiatan I : Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu

Kegiatan II : Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Manajemen ASN

Kegiatan III : Akuntabilitas

Kegiatan IV : Akuntabilitas, Nasionalisme dan Komitmen Mutu

Kegiatan V : Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi

Kegiatan VI : Akuntabilitas dan Etika Publik.

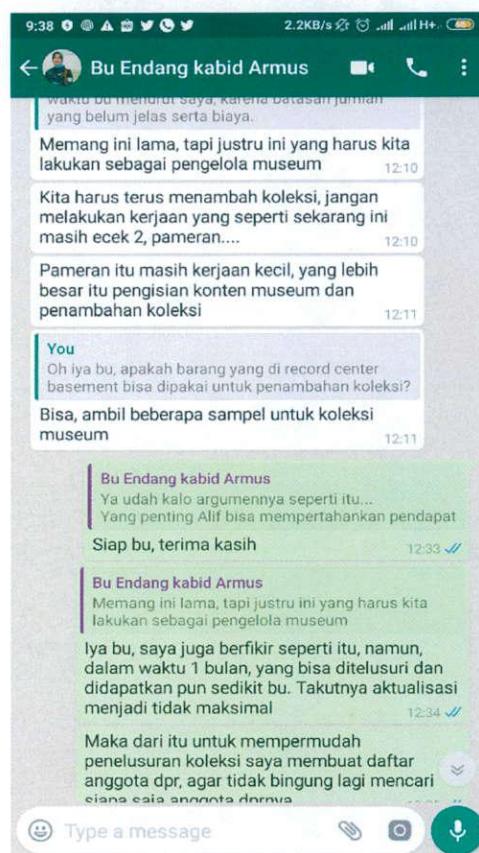
## B. Saran

Pengembangan kajian museum belum dilakukan sebelumnya, maka dari itu ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Pengaturan waktu untuk mengerjakan rancangan situs ini juga perlu dilakukan secara pasti agar tidak memberatkan pekerjaan yang lain.

Secara keseluruhan, semua CPNS yang ada baiknya diberikan pelatihan lain yang menunjang pekerjaannya di kemudian hari. Pelatihan dasar ini hanyalah gerbang awal untuk terus mengembangkan kompetensi masing-masing. Pelatihan-pelatihan lanjutan yang sesuai bidangnya ini tentu akan meningkatkan kemampuan unit khususnya, serta instansi secara seluruhnya.

## Lampiran Kegiatan I-VI

### Kegiatan I



#### Kegiatan I.I

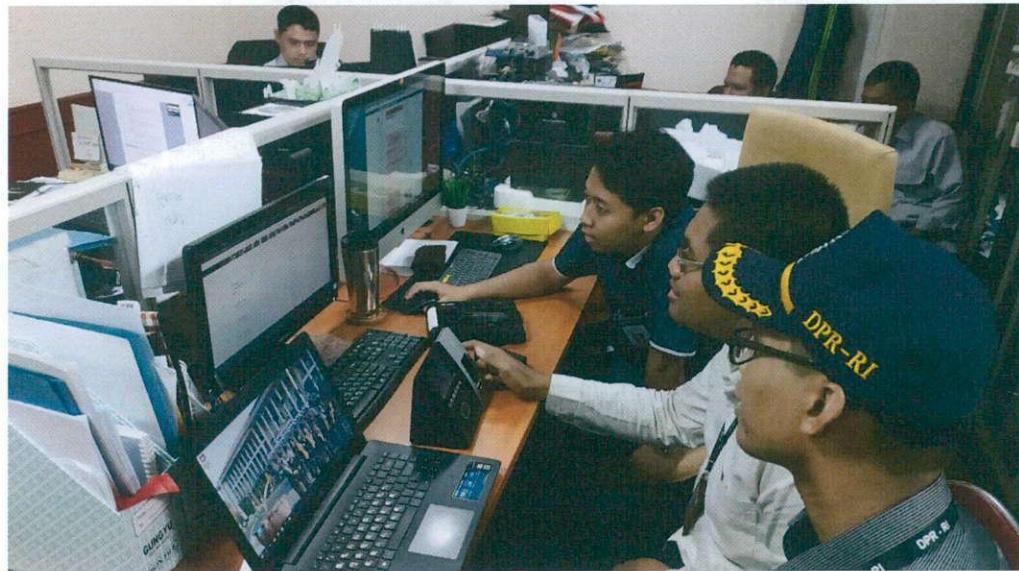
Konsultasi dengan pembimbing mengenai Konten situs yang disampaikan.



Kegiatan I.II

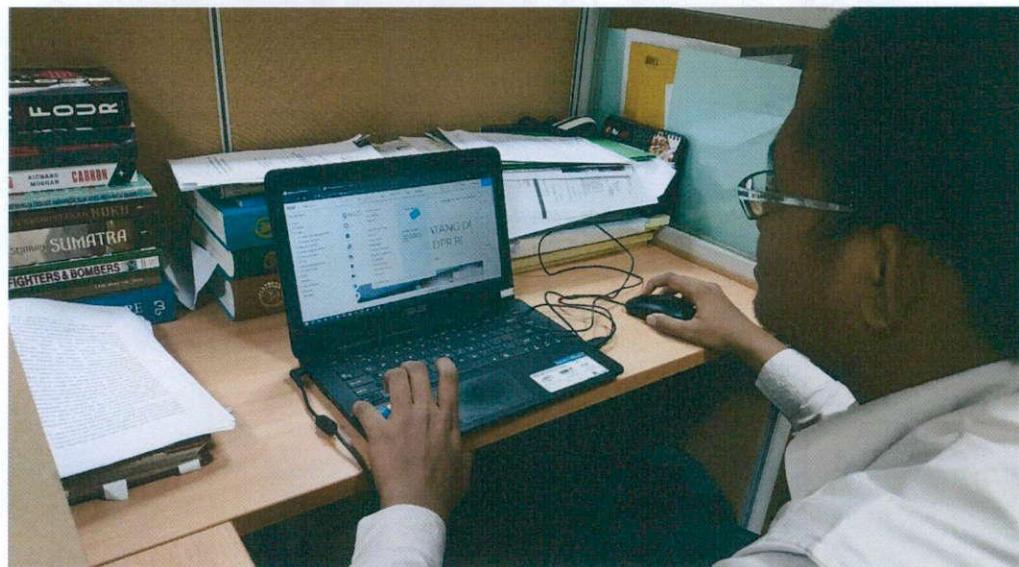
Konsultasi dengan rekat sejawat mengenai konten situs.

## Kegiatan II



## Kegiatan II.I

Konsultasi dengan rekan BDTI, Daniel dan Sasmito



## Kegiatan II.II

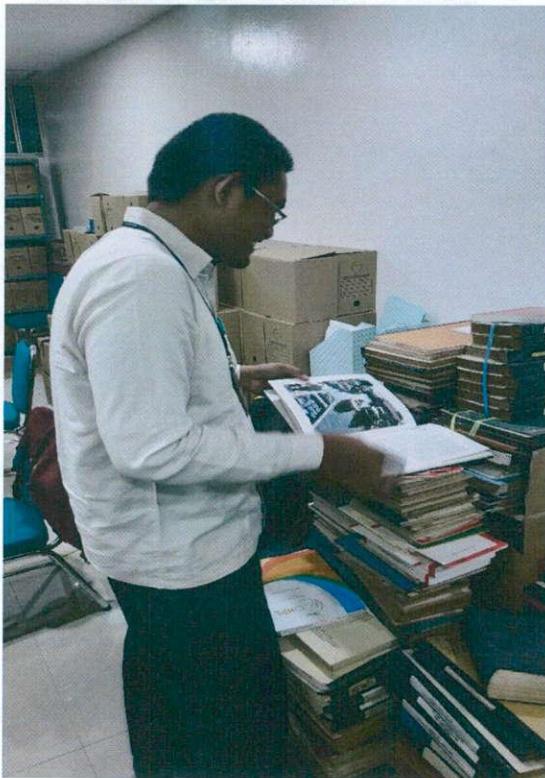
Pembuatan situs kosong dengan menggunakan wixsite



### Kegiatan II.III

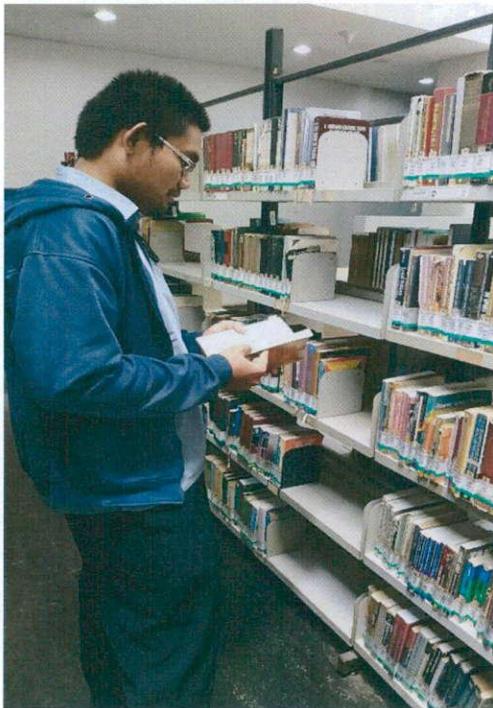
Pelaporan situs kosong kepada pembimbing

### Kegiatan III



### Kegiatan III.I

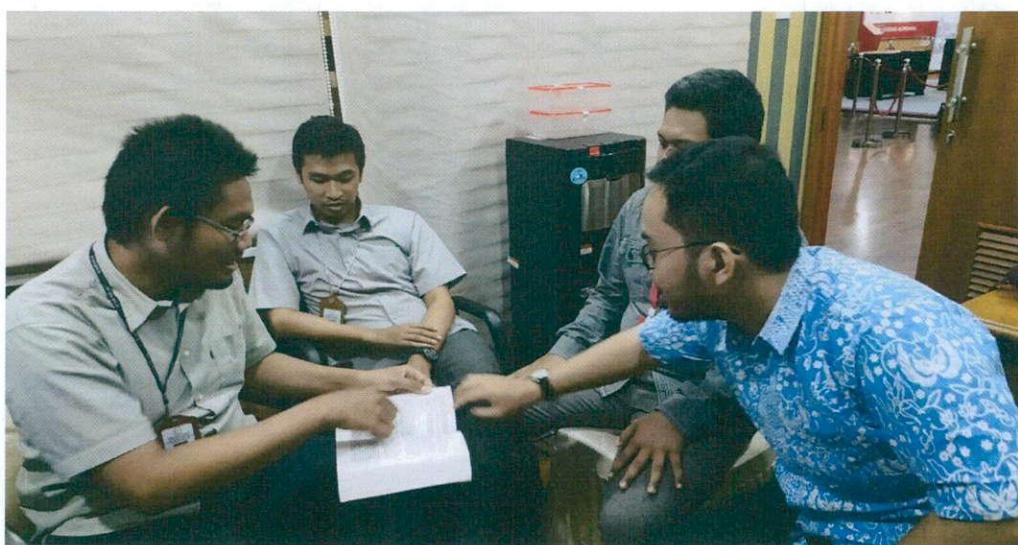
Pencarian data di Record Center  
Bidang Arsip dan Museum di  
Basement Nusantara III.



#### Kegiatan III.II

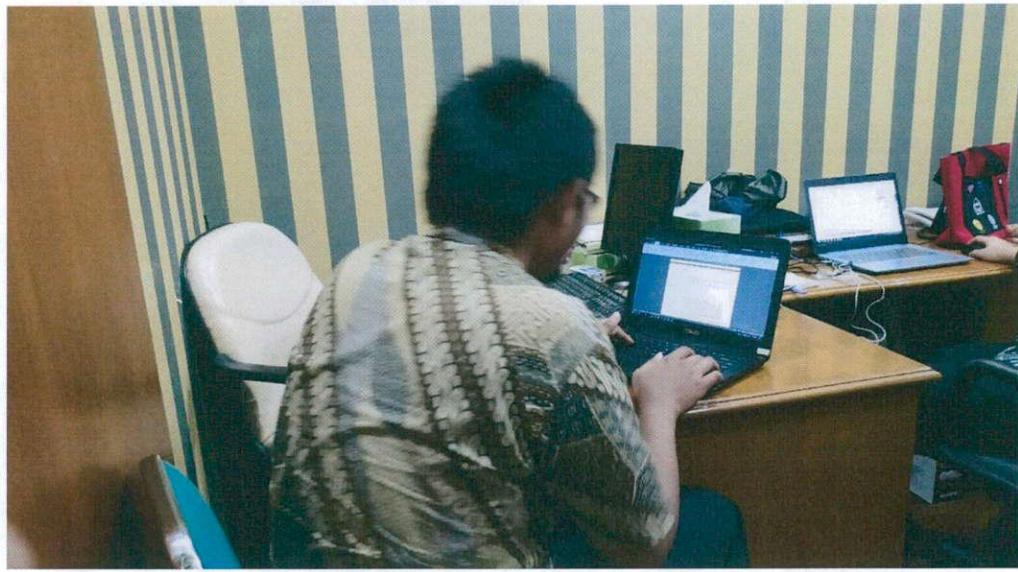
Pencarian data di Perpustakaan  
Pusat Universitas Indonesia.

#### Kegiatan IV



#### Kegiatan IV.I

Konsultasi dengan rekan sejawat mengenai hasil yang didapat sebelum ditulis dan dimasukkan ke rancangan situs.



Kegiatan IV.II

Pengolahan data yang terkumpul



Kegiatan IV.III

Penulisan data yang sudah di olah kedalam situs.

## **Kegiatan V**

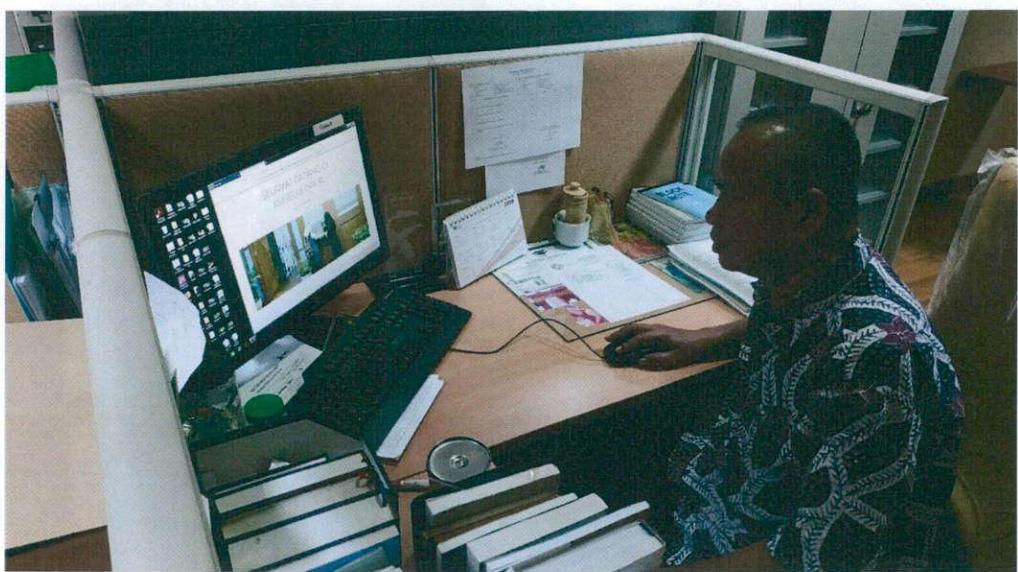


## **Kegiatan V.I**

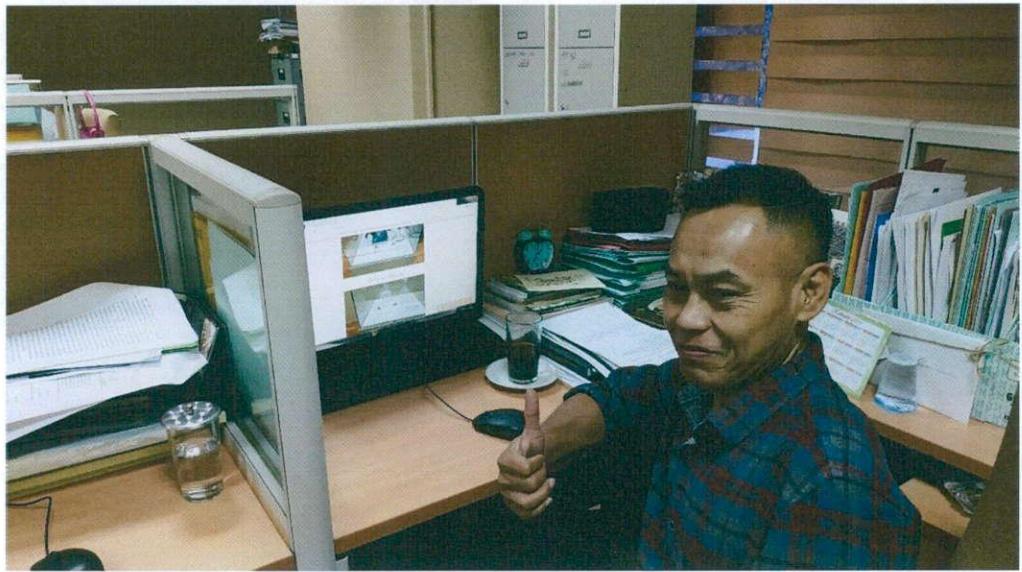
Pembuatan indikator survei situs

## **Kegiatan V.II**

Uji Coba situs



Uji Coba situs oleh Pak Suhari



Uji coba situs oleh Pak Mardana



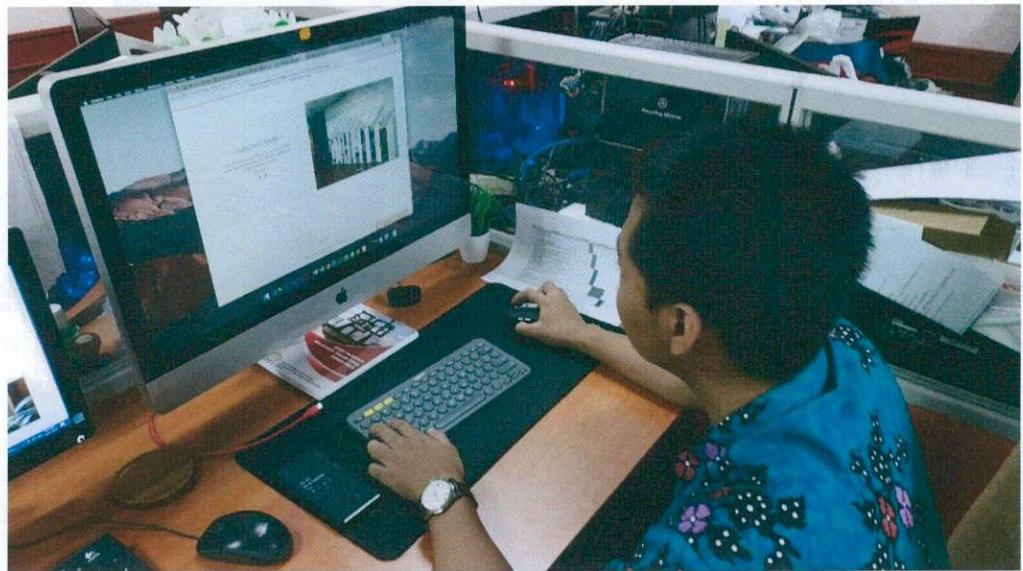
Uji coba situs oleh Arum



Uji Coba Situs Oleh Nala



Uji coba situs oleh Gamal



Uji Coba situs oleh Daniel



Uji coba situs oleh Sasmito

## Kegiatan VI



## Kegiatan VI.I

Pelaporan situs kepada pembimbing



## Kegiatan VI.II

Pelaporan rancangan situs kepada coach

### Lampiran Konsultasi dengan Coach



Coaching pada tanggal 4 September 2019



Coaching pada tanggal 20 September 2019



Coaching pada tanggal 27 September 2019



Coaching pada tanggal 4 Oktober 2019

### Lampiran Database Anggota KNIP



001. Abdul Karim atau Oei Tjeng Hien lahir pada tanggal 6 Juni 1905 di Padang Panjang. Oei, yang orangtuanya asli negeri Tiongkok ini lahir di keluarga yang cukup berada. Oei muda dulu berusaha menemukan jati dirinya lewat agama. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Abdul Karim Oei memutuskan memeluk Islam. Saat itu di tahun 1930-an, sesuatu yang jarang terjadi seorang Tionghoa memeluk Islam. Keputusan ini membuat dia dijauhi oleh komunitas Tionghoa. Sebaliknya, suku Melayu menerima Oey dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Oey dekat dengan orang-orang Melayu. Pada saat kemerdekaan, beliau menjadi tokoh perwakilan dari Masyumi Beliau dikenal dekat dengan Buya Hamka dan Soekarno, serta menjadi tokoh Muhammadiyah. **Ensiklopedi Muhammadiyah**



002. Kyai Haji Raden Abdullah bin Nuh, yang biasa di sebut Mama Ajengan Abduullah bin Nuh oleh orang Bogor. Ia lahir di kampung Bojong Meron, Cianjur tanggal 30 Juni 1905 dan wafat di Bogor pada 26 Oktober 1987. Pertama mendapat pendidikan agama yang sangat disiplin dari ayahnya, yakni KH. R. Muhammad Nuh bin Muhammad Idris yang juga seorang Ulama besar pendiri sekolah Al I'anah Cianjur dan murid utama KH. Muhtar seorang guru besar di Masjidil Haram Makkah.

KH. Abdullah bin Nuh pernah dibawa bermukim di Makkah kurang lebih 2 tahun, pada saat itu ia masih balita, dan tinggal bersama Nyi Raden Kalifah Resti yaitu neneknya dari ayah. Dari pengalaman tinggal di Makkah itu lah, menurut beberapa sumber, bakatnya berkembang untuk menjadi penyair dan sastrawan Arab. Dengan kecerdasan yang dimiliki dan keuletan beliau dalam belajar, menghantarkan R. Abdullah bin Nuh kecil menjadi murid yang sangat unggul, di usianya yang baru 8 tahun sudah menguasai bahasa Arab. Juara Al Fiyah, sanggup menghafal Al Fiyah Ibnu Malik dari awal sampai akhir, bahkan membaca dibalik dari akhir sampai awal. Menjelang tahun 1928, Madrasah Al I'anah memberikan gelar dakhiliyyah kepada 6 orang murid pilihan dan salah satu yang terpilih adalah KH. Abdullah bin Nuh. Ke 6 orang murid tersebut diberangkatkan ke Pekalongan untuk bermukim di Pondok Pesantren Syamailul Huda, yang dipimpin oleh seorang Guru Besar yaitu Sayyid Muhammad bin Hasyim bin Tohir Al Alawi Al Hadromi. Pondok pesantren Syamailul Huda laksana Masjidil Harom dan Darul Arqam pada zaman Rasulullah Saw.

Pada bulan November 1943 atau lebih kurang setahun setelah tentara Jepang masuk ke Indonesia, mereka merangkul kalangan pesantren dan para ulama untuk membentuk tentara PETA (Pembela Tanah Air) dimana Abdullah bin Nuh menjadi salah satu anggotanya bahkan sempat menjabat komandan (daidanco) pada 1943-1945 untuk wilayah Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Situasi saat itu sangatlah kritis. Di Surabaya, Syaikh Sayyid Muhammad bin Hasyim yang merupakan guru tercinta KH. Abdullah bin Nuh, juga di Tasikmalaya ulama besar KH. Zainal Musthofa dan banyak lagi ulama dan pejuang yang di tangkap dan di penjara oleh Jepang. Tidak terima dengan kondisi seperti itu maka para pejuang PETA pun akhirnya memberontak melawan Jepang.

Dorongan untuk senantiasa tetap berada di medan perjuangan begitu kuat, sehingga tahun 1945-1946, beliau di percaya untuk memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada saat agresi militer Belanda ke dua, KH. Abdullah bin Nuh telah aktif menjadi wartawan APB (Arabian Pers Borad) dan anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat cikal bakalnya MPR-DPR Indonesia di Yogyakarta). KH. Abdullah bin Nuh beserta rombongan wartawan APB di tangkap dan di tawan oleh Belanda di Bekasi. KH. Abdullah bin Nuh pun pernah di tangkap dan di vonis hukuman mati, namun beliau dapat meloloskan diri dan bersembunyi, lalu dengan nama samaran menuju Jakarta dan berlindung di rumah Muhammad Asad Shahab

<https://www.nu.or.id/post/read/47570/kh-abdullah-bin-nuh-ulama-produktif-yang-mendunia>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/05/m8af67-kh-abdullah-bin-nuh-ulama-pejuang-dari-cianjur-3>

004. Abu Hanifah lahir di Padang Panjang, sekampung dengan Sutan Syahrir, pada 6 Januari 1906. Dia menempuh pendidikan menengah di ELS dan melanjutkan pendidikan ke Stovia, Jakarta. Pada masa inilah dia aktif di Jong Sumatra. Seperti kita ketahui, Jong Sumatra adalah salah satu organisasi pemuda daerah yang ikut dalam Kongres Pemuda 26-28 Oktober 1928. Salah satu tokoh Jong Sumatra, Muhammad Yamin, menjadi sekretaris Kongres Pemuda.

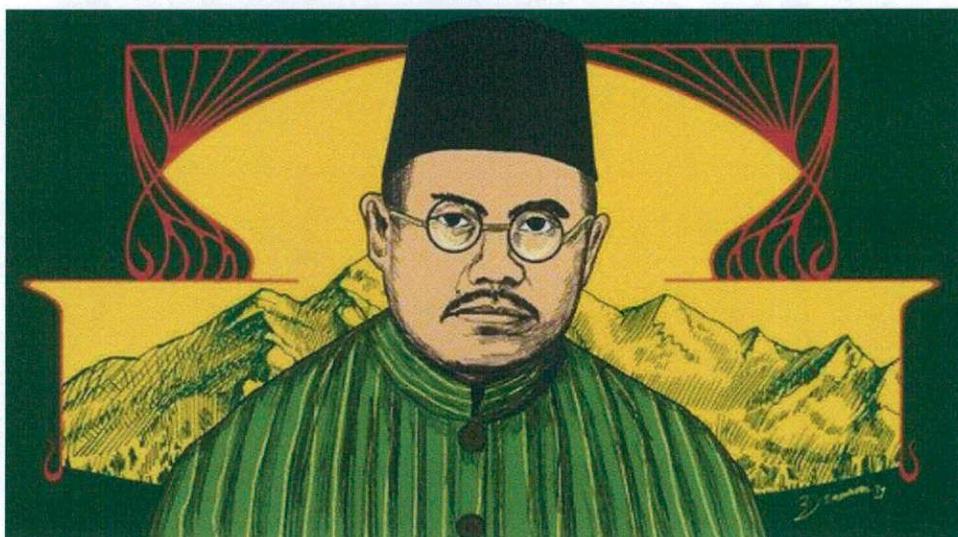
Lulus dari sekolah kedokteran, Abu Hanifah memilih bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Sembari menjadi dokter rumah sakit, Hanifah

terus menggeluti hobi tulis-menulis sastra. Pada masa pendudukan Jepang, dia dikenal dengan nama samaran El Hakim. Setelah Indonesia merdeka, Abu Hanifah bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat. Kiprah politiknya dimulai di Masyumi, partai yang didirikan sebagai wadah aspirasi umat Islam. Ia menjadi pengurus bersama-sama tokoh Islam lain seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Anwar Cokroaminoto, dll. Karena posisinya ini, ia dipercaya untuk memimpin fraksi Masyumi di KNIP (DPR saat itu). Selain di parlemen, Abu Hanifah juga sempat menduduki jabatan eksekutif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disandangnya selama Indonesia berbentuk negara serikat, Republik Indonesia Serikat. Umur RIS yang pendek membuat dia hanya sebentar berada dalam posisi itu

<https://m2indonesia.com/tokoh/sastrawan/abu-hanifah.htm>

006. Ajengan Ahmad Sanusi lahir di Cantayan, Cikembar pada 1888. Ia belajar di sejumlah pesantren dan menunaikan ibadah haji, Ahmad Sanusi kembali ke kampung halamannya. Ia membantu ayahnya mengajar di Pesantren Cantayan. Pada 1915, di tengah kesibukannya sebagai dai, Ahmad Sanusi menerima permintaan seorang koleganya untuk menjadi penasihat Sarekat Islam Sukabumi. Namun, menurut Yayan Suryana, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Ahmad Sanusi tidak setuju dengan sistem sentralisasi khas Sarekat Islam. Ahmad Sanusi menginginkan uang kontribusi dari anggota Sarekat Islam tidak semuanya diserahkan ke pusat, melainkan dibagi dengan daerah. Tapi usulannya tak diterima. Meski tidak lagi menjadi penasihat Sarekat Islam, ia masih berhubungan dengan organisasi pergerakan tersebut lewat sejumlah santrinya yang aktif di Sarekat Islam. Hal ini juga yang akhirnya menyeret namanya pada peristiwa Cimareme atau Sarekat Islam Afdeling B yang dipimpin Haji Hasan. Pada 1927, atas perintah Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff, ia dipindahkan ke Tanah Tinggi, Batavia. Dalam pengasingan di Tanah Tinggi, Ahmad Sanusi mengisi hari-harinya dengan menulis tentang ilmu-ilmu kegamaan seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Ia bahkan membuat majalah Al-Bidayah al-Islamiyah

yang terbit sebulan sekali. Setelah dibebaskan, Ahmad Sanusi kembali ke Sukabumi, tapi tak lagi menetap di tempat tinggalnya semula. Ia pindah ke Gunung Puyuh dan mendirikan Pesantren Syamsul Ulum pada 1934. Setelah proklamasi kemerdekaan, nama KH Ahmad Sanusi tercatat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Saat pusat pemerintah dipindahkan ke Yogyakarta, KH Ahmad Sanusi juga turut serta pindah ke sana. Setelah kembali ke Sukabumi, pada 1950, ia berpulang ke hadirat llahi.



<https://tirto.id/kh-ahmad-sanusi-ulama-sukabumi-penengah-kebuntuan-sidang-bpupki-efkl>

007. Siti Aisyah lahir di Kauman pada 1905 dan wafat pada 10 Agustus 1968. Nama Hilal yang disandang di belakang namanya merupakan nama suami H.Hilal. Di bawah bimbingan kedua orang tuanya yang tidak lain adalah perintis gerakan Muhammadiyah, Siti Aisyah mendalami ilmu agama setelah lulus dari sekolah netral. Ilmu agama didalamnya di asrama (internaat) putri dan dibimbing secara intensif oleh sang ibu, Nyai Ahmad Dahlan. Kiprah Siti Aisyah di organisasi mulai menonjol sejak terbitnya Majalah Soeara 'Aisjijah pada 1926.

Namanya tercatat sebagai redaktur pertama majalah bersama Siti Badilah dan Siti Djalalah. Tahun 1931 menjadi tahun penting di mana kiprahnya di 'Aisyiyah menjadi awal perjalanannya panjangnya di organisasi ini.



Pada kongres Muhammadiyah ke-20 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Siti Aisyah terpilih sebagai ketua 'Aisyiyah meneruskan estafet kepemimpinan sang ibu. Sekalipun tercatat sebagai anak pendiri, Siti Aisyah bebas dari pengkultusan individu dalam perjalannya di organisasi, hal itu terbukti dari terpilihnya Siti Munjiyah pada pemilihan ketua tahun berikutnya dan seterusnya silih berganti dari satu kader ke kader yang lainnya. Pada 1939, Siti Aisyah kembali terpilih menjadi ketua 'Aisyiyah. Setelah Kemerdekaan beliau aktif memperjuangkan suara wanita dan ikut menjadi anggota KNIP

<http://www.aisiyah.or.id/en/page/tokoh/hal/6.html>



011. Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Rabi'ul-akhir 1308 H bertepatan dengan 24 November 1890, dan wafat di Yogyakarta Jumat 5 Muharam 1374 H atau 3 September 1954 dalam usia 64 tahun.

Ki Bagus Hadikusumo seorang ulama pejuang, mubaligh, penulis buku dan pemimpin umat yang disegani. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tabligh lalu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1942 – 1953. Ki Bagus

Hadikusumo aktif dalam usaha pembentukan partai Masyumi tahun 1945 yang didirikan sebagai satu-satunya partai bagi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Syura Masyumi periode pertama diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan Wakil Ketua Ki Bagus Hadikusumo sampai tahun 1950.

Pada 1922 Ki Bagus diangkat oleh Gubernur Belanda menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura, serta bersama Prof. Dr. Husein Djajadiningrat ditugaskan menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mencatat nama Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh pendiri UII. Pada zaman Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Tyuo Sangi In mewakili golongan Islam bersama K.H.A. Wahid Hasjim, K.H.A. Kahar Mudzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso. Ki Bagus Hadikusumo satu di antara sedikit ulama yang berani menentang perintah Pemerintah Dai Nippon agar melakukan Saikirei, yaitu membungkukkan badan ke arah Istana Diraja Tenno Heika di Timur Laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang dianggap keturunan dewa matahari. Selain Ki Bagus, tokoh Muhammadiyah Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) juga menolak Saikirei karena berlawanan dengan akidah Islam.

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota KNIP mewakili Masyumi. **Ensiklopedi Muhammadiyah, Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri**

## **51. Siti Soekaptinah Soenarjo Mangunpuspito Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama**

Perempuan kelahiran Yogyakarta tanggal 28 Desember 1907 ini berpendapat bahwa seorang wanita mempunyai Hak untuk memilih dan menentukan Jodohnya sendiri. Ia mengemban pendidikan di HIS pada tahun 1916-1921, lalu melanjutkan di MULO pada tahun 1922-1924, dan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Taman Guru Tamansiswa hingga 1926. Selama mengemban pendidikan beliau merupakan seorang siswi yang rajin dan ulet. Setelah menamatkan pendidikan terakhirnya beliau bekerja sebagai Pamong tamansiswa dan sebagai karyawan Balaikota Semarang.

Ketika masih di Mulo, ia menjadi anggota Jong Java dan merupakan seorang anggota yang aktif hingga tahun 1926. Kemudian ia menjadi anggota organisasi Pemuda Indonesia dan mewakili Jong Islamiten Bond Afdeeling Wanita dari tahun 1926 hingga 1929. Ketika menjadi anggota Pemuda Indonesia inilah Soekaptinah menjadi penulis dalam Kongres Perempuan Indonesia I. Pada waktu Kongres Perempuan Indonesia I, Siti Soekaptinah mengarang Panembrama "Kinanti Sekar Gending Srikanthawati: Ladrang Pelog Barang". Lagu karangannya itu dinyanyikan pada malam pembukaan Kongres Perempuan Indonesia I. Selain itu, ia juga menjadi ketua Pengurus Besar Istri Indonesia 1932-1940, anggota Budi Utomo 1934-1938. Hingga Akhirnya ketika kemerdekaan Indonesia ia menjabat sebagai Anggota KNIP dari Partai Masjumi



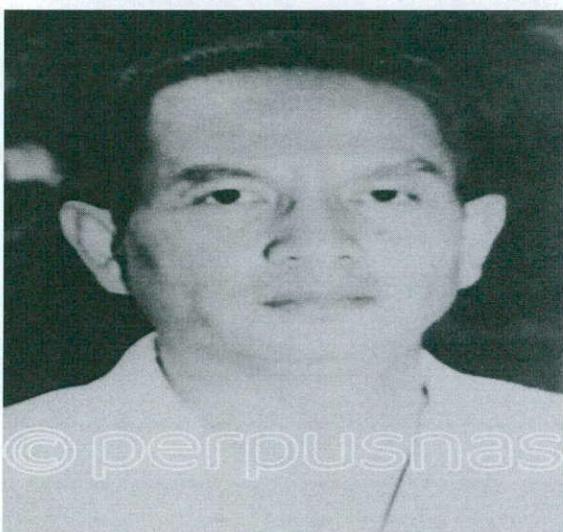
### 58. Wachidah Pramana konstituante.net



Anggota KNIP pleno ke 6 ini merupakan wanita kelahiran Yogyakarta tahun 1920. Ia mengawali pekerjaannya dengan menjadi Guru Agama di Sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta dari tahun 1937- 1940. selain itu, ia juga menyambi menjadi redaksi majalah Suara Aisijiah dan Sekretaris Pengurus Besar Aisijiah Yogyakarta. Setelah Kemerdekaan, ia menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia hingga tahun 1947. Barulah pada tahun 1949

ia menjadi wakil Masjumi di KNIP.

### 86.Mr Raden Mas Sartono



<http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/Sartono-Raden-Mas?lang=id>

Lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Agustus 1900. Ia mengenyam pendidikan di HIS dan lulus di tahun 1915, lalu lulus MULO dan Rechts School di tahun 1922, dan lulus dari Universitas Leiden di jurusan Hukum pada

tahun 1926. Saat di Belanda ia aktif menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia, dan ketika di Indonesia 1927-1930 menjadi ketua muda pengurus besar PNI. Waktu Gerindo berdiri di tahun 1937- 1942 ia menjadi ketua muda pengurus besarnya. Setelah Merdeka ia tercatat menjadi Anggota KNIP pleno ke enam.

115. Moedikdio [buku rakyat memilih anggota parlemen]



Beliau lahir di Medan tanggal 20 Desember 1904. Sejak umur 14 tahun sudah aktif dalam berbagai organisasi wanita. Dari 1931-1954 menjadi aktivis di Partindo, setelah itu ia menjadi Anggota DPP Gerwani ditahun 1954. Beliau pun aktif menyuarakan dan memperjuangkan suara suara rakyat, terutama suara PKI.

160. Umi Sardjono[buku rakyat memilih anggota parlemen]



Nyonya Umi Sardjono merupakan perempuan kelahiran Salatiga, 24 Desember 1923. Ia ditahun 1944 bekerja sebagai pegawai biasa di kantor telepon bagian administrasi di Semarang. lalu di tahun 1946 hingga 1947 menjadi Kepala Bagian Wanita Biro Perjuangan Daerah IV Kediri, dan ditahun 1951-1953 menjadi Anggota Komisi Djaminan Sosial Buruh Wanita Kementerian Perburuan.

Di bagian pergerakan politik, ia mulai aktif di tahun 1938 dengan menjadi anggota Parindra. Lalu di zaman penjajahan jepang ia ikut menjadi Anggota Gerakan Kemerdekaan anti fasis di jawa timur, namun ia tertangkap dan tinggal di penjara dari bulan Februari hingga September 1945. Setelah

Kemerdekaan indonesia, tepatnya di tahun 1947 ia menjadi anggota Partai Buruh Indonesia dan disaat yang sama menjadi perwakilan di KNIP.

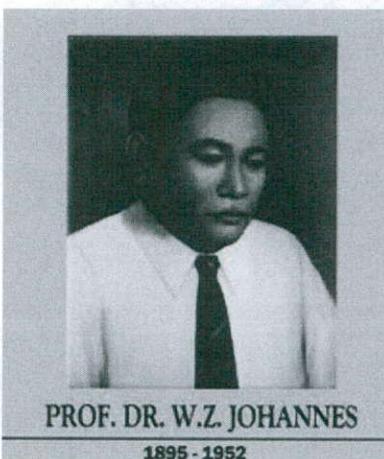
### 172. Nj. Suwarti Bintang Suradi Konstituante.net



Perempuan kelahiran Ngawi tanggal 1 Agustus 1914 ini merupakan contoh dari wanita yang mengambil jalur pergerakan secara formal, yaitu melalui KNID Surakarta di tahun 1945-1946, dan melanjutkan menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP hingga tahun 1950.

### 211 W Z Johannes

<https://pahlawancenter.com/prof-dr-w-z-johannes/>



Seorang Putera Indonesia kelahiran Termanu, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi ahli rontgen pertama Indonesia. Dalam tahun 1941 berhasil mempertahankan desertasinya yang berjudul "Rontegen diagnostiek der maliga langtumoren". dan untuk itu berhak memakai gelar doktor. Prestasi itu dicapainya berkat ketekunan bekerja dan dibantu oleh

kecerdasan otaknya.ia adalah Wilhelmus Zakarias Yohannes, lahir tahun 1895, putera dari seorang guru bantu Sekolah Dasar yang sekaligus merangkap menjadi pengurus gereja. Sebagai anak seorang guru bantu Yohannes tidak berhak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi kecerdasan otaknya telah menolongnya.

Kepala Sekolah Dasar di desa kelahirannya bersama dengan adik iparnya, C. Frans, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda memohon agar Yohannes diizinkan memasuki Europese Lagere School (ELS). Permohonan itu dikabulkan. Yohannes menamatkan ELS di Kupang dalam waktu yang lebih singkat dari yang seharusnya. Sesudah itu berangkat ke Jakarta dan memasuki STOVIA (School Tot Opleiding voor Inlandsche Arsten = Sekolah Dokter Bumiputera). Masa pendidikan yang seharusnya sembilan tahun dapat diselesaikannya dalam waktu delapan tahun. Pada tahun 1920 sudah menggondol gelar dokter. Mula-mula bekerja sebagai dosen pada NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School = Sekolah Dokter Hindia Belanda) di Surabaya. Tidak lama kemudian, dalam tahun 1921, diangkat sebagai dokter di rumah sakit Bengkulu. Sesudah itu berturut-turut sampai tahun 1930 bertugas di rumah-rumah sakit di Muara Aman, Mana, Kayu Agung dan Palembang. Dalam tahun 1930, ketika bertugas di Palembang, Yohannes mengalami musibah, diserang penyakit lumpuh. Ia segera dibawa ke Jakarta dan diberikan perawatan khusus di CBZ (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo).

Satu tahun lamanya ia dirawat dan setelah sembuh, kaki kanannya pincang untuk selama-lamanya. Masa perawatan di CBZ tidak disia-siakannya. Semangat belajarnya tidak pernah padam. Sambil berbaring di tempat tidur, asyik membaca buku dan mendalami masalah rontgen (sinar tembus). Pada waktu itu pengobatan dengan rontgen belum maju seperti sekarang. Yohannes yakin, bahwa penyakit lumpuh seperti yang dideritanya dapat disembuhkan dengan pengobatan rontgen. Hal itu menyebabkan keahliannya bertambah, sehingga kemudian berhasil meraih gelar doktor. Setelah kesehatannya pulih, walaupun dengan kaki kanan tetap pincang, ia diangkat sebagai Asisten Ahli dalam bidang rontgen dan radiologi di CBZ Jakarta. Bulan Juni 1935 ia dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang (sekarang Rumah Sakit Dr. Karyadi).

Di tempat yang baru ini ia mengembangkan ilmu rontgen. Untuk memperingati jasanya di bidang pengembangan ilmu rontgen itu, namanya diabadikan pada ruangan Rontgen Rumah Sakit dr. Karyadi. Setahun kemudian ia dipindahkan kembali ke Jakarta dan diangkat sebagai Kepala Bagian Rontgen CBZ. Kegiatan Yohannes tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran. Ia juga mengikuti perkembangan yang terjadi di tanah airnya. Seperti kebanyakan lulusan STOVIA. Ia pun terjun kedalam kegiatan pergerakan nasional. Sebagai seorang penganut agama Kristen Protestan, maka melalui organisasi agama inilah berjuang. Dalam tahun 1929 golongan Kristen Protestan mendirikan organisasi yang disebut "Perserikatan Kaum Kristen" (PKK), walaupun organisasi ini mengutamakan dasar kekristenan, tetapi ia juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Keanggotaan Yohannes dalam PKK menyebabkan kegiatannya bertambah. Serentak dengan itu namanya semakin dikenal oleh masyarakat.

Cacat tubuh tidak menjadi halangan baginya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kemanusiaan. Dalam tahun 1939 masyarakat Karesidenan Timor (Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa) mencalonkan Yohannes sebagai wakil mereka dalam Volksraad (Dewan Rakyat), namun pencalonannya itu ditolak oleh pemerintah. Tiga tahun kemudian ia terpilih sebagai anggota Badan Pengurus "Organisasi Penolong Ambon-Timur" bersama dr. Kayadu dan Mr. Latuhaarhary. Sementara itu karirnya dalam bidang kedokteran terus meningkat. Dalam tahun 1939 ia diangkat menjadi pimpinan bagian radiologi di CBZ, Jakarta, karena dia adalah satu-satunya dokter Indonesia yang memiliki keahlian di bidang ini. Di zaman Jepang meneruskan kegiatannya dalam organisasi di samping tugasnya sebagai dokter. Bersama dengan dr. Sitanala, Dr. Sam Ratulangi, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Rufinus Tobing, Ds. B. Probowinoto, Asa, dan lain-lain ia turut mendirikan "Badan Persiapan Persatuan Kristen" (BPPK). Badan inilah yang kelak menjelma menjadi

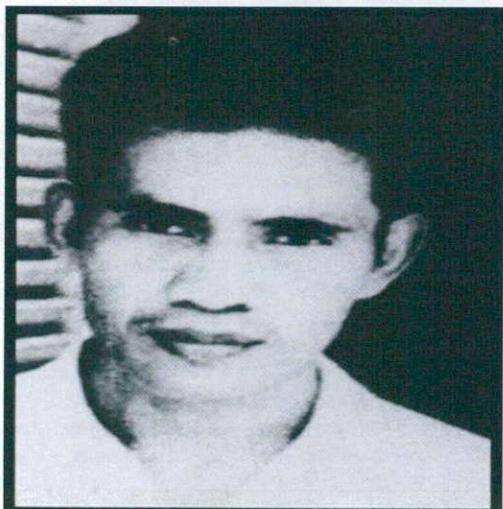
"Partai Kristen Indonesia" (Parkindo). Parkindo lahir pada tanggal 6 November 1945 setelah diadakan rapat umat Kristen di Balai Pertemuan /Kristen di Jakarta. Rapat itu membicarakan kemungkinan didirikannya sebuah partai, dan dua belas hari kemudian berdirilah "Partai Kristen Nasional" (PKN). Yohannes diangkat menjadi ketuanya.

Dalam kongresnya yang pertama pada tanggal 6-7 Desember 1945 di Surabaya, nama partai itu diubah menjadi Partai Kristen Indonesia. Ketuanya yang baru ialah Ds. B. Probowinoto sedangkan Yohannes menduduki jabatan wakil ketua. Pengaruh Yohannes dalam Parkindo cukup besar. Ia seringkali bertindak mengadakan pergantian pengurus cabang. Selain Parkindo, dibentuk pula sebuah organisasi perjuangan, yakni "Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil" (GRISK). Tujuan GRISK ialah menggalang persatuan penduduk Sunda Kecil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rumah Dr. Yohannes di Jalan Kramat Raya 51 Jakarta menjadi kantor pusat GRISK dan sekaligus menjadi markas persembunyian para pemuda pejuang daerah Kramat Pulo. Tindakan itu mengandung resiko. Rumah itu dan Dr. Yohannes pribadi tidak luput dari incaran musuh. Beberapa kali terpaksa berhadapan dengan serdadu Belanda dan Gurkha. Hari Natal 1945 sepasukan serdadu Gurkha datang ke rumahnya dalam keadaan siap tempur. Mereka mencari pemuda-pemuda yang sering mengganggu patroli Gurkha. Yohannes diperintah keluar dari rumah, tetapi perintah itu tidak diindahkannya. Komandan pasukan Gurkha mengambil tindakan kekerasan. Dr. Yohannes digiring ke pos Gurkha. Selama empat jam dihukum jongkok. Hukuman itu cukup berat bagi seorang yang kakinya pincang. Tetapi Yohannes tidak mengeluh dan setelah hukuman itu berakhir, langsung berangkat ke rumah sakit melaksanakan tugasnya. Pada waktu yang lain harus pula berhadapan dengan pasukan Belanda. Waktu itu seluruh daerah Kramat sudah dikuasai NICA (Belanda), kecuali rumah Yohannes. Rumah itu tetap mengibarkan bendera Merah Putih.

Beberapa kali serdadu Belanda datang dan memerintahkan agar bendera itu diturunkan, tetapi Dr. Yohannes berhasil mempertahankannya. Suatu kali sepasukan KNIL datang dan seorang anggotanya langsung merobek bendera Merah Putih sehingga koyak dua. Bagian merahnya diambil oleh serdadu yang merobeknya dijadikan ikat kepala, sedangkan bagian putihnya dibuang di tanah. Sesudah pasukan itu pergi, Yohannes berkata seorang diri, "Karena bukan saya yang menurunkan, nanti saya naikkan kembali". Beberapa saat kemudian bendera Merah Putih berkibar kembali di halaman rumahnya. Sebagai seorang republikan tetap setia kepada perjuangan. Pemerintah mengangkatnya menjadi anggota BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai wakil gabungan Kristen

**251. Sajuti Melik Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945**

Mohammad Ibnu Sayuti Melik, atau dikenal juga dengan nama samarannya Yuti Sudrono lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Ia mengemban ilmu di sekolah guru dan sejak muda ia giat dalam gerakan



kemerdekaan. Hingga pada tahun 1927 ia dibuang ke Digul hingga 1938. Setelah dibebaskan, ia menerbitkan koran Pesat Semarang, Sering Terkena Delik Pers dan Keluar masuk penjara karena tulisannya. Selain ikut aktif dalam proklamasi kemerdekaan, ia juga aktif menjadi Redaksi Kedauleatan Rakyat (1946-1948), dan tercatat

menjadi anggota KNIP ke enam,

**267. A R Baswedan Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945**



Beliau lahir di Surabaya tahun 1908. Di zaman Belanda ia aktif diberbagai gerakan pemuda, seperti Pemuda Progressif, Jong Islamieten Bond, Partai Arab Indonesia, dan menjadi Penerbit dan pemimpin majalah Sadar hingga masuknya Jepang. Di zaman Jepang, ia menjadi anggota Hookokai dan Tyuo Sangi-in. Saat kemerdekaan ia menjadi salah satu anggota BPUPKI dan setelah itu menjadi anggota KNIP di tahun 1946.

**289. Sujatin Kartowijono Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama**



Tokoh kelahiran Wates tanggal 9 Mei 1907 ini merupakan tokoh yang unik, pada awalnya ia senang bisa bersekolah di HIS Karanganyar dan merupakan siswa teladan, namun kemudian ia merasa tidak suka dengan suasana sekolah yang kaku dan serius. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa ayahnya menginginkan anak laki, yang membuat ia bertekad untuk membuktikan bahwa perempuan tidak akan kalah dengan lelaki. Sujatin kecil terpengaruh dengan pemikiran Kartini karena ia mendapatkan hadiah buku bacaan Habis Gelap Terbitlah Terang dan bertekad untuk mendidik kaum wanita agar bisa sanggup berdiri sendiri.

Ia sudah aktif mengikuti berbagai organisasi mulai dari Jong Java, lalu ikut mendirikan perkumpulan guru wanita yang diberi nama Poetri Indonesia di tahun 1926. Di masa penjajahan Jepang, ia sempat diundang untuk membuat perkumpulan baru dibawah pemerintahan Jepang namun ia menolak dan berargumen menggunakan perkumpulan yang sudah ada. Dilain pihak, ia sangat ulet dalam mempelajari bahasa Jepang sehingga ia diberi kepercayaan untuk mengajar bahasa jepang di sekolah yang ada dibawah pengawasan dan menjadi penerjemah. Setelah merdeka, ia merupakan anggota dari Badan Kongres Wanita Indonesia dan juga menyambi menjadi anggota KNIP.

334 Sukarjo Wirjopranoto

<https://pahlawancenter.com/sukardjo-wirjopranoto/>

Sukardjo adalah putra Wiryodiharjo yang bekerja pada Jawatan Kereta Api pada zaman Hindia Belanda. Ibunya berasal dari Purwokerto, keturunan seorang alim ulama, bernama Kyai Asmadi. Sukardjo dilahirkan di Desa



Kasugihan kurang lebih 20 km dari Cilacap, Jawa Tengah, pada tanggal 5 Juni 1903. Ia bersaudara berjumlah tujuh orang dan ia adalah anak keenam. Sukardjo belajar pada Europesche Lagere School (ELS) sama dengan SD berbahasa. Pada tahun 1917 Sukardjo lulus Europesche Lagere School (ELS). Sesudah itu ia melanjutkan pendidikan di sekolah Hukum (Rechts School) di Jakarta. Lima tahun kemudian ia sudah lulus sekolah

hukum dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri. Pada tahun 1937 ia diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai wakil Budi Utomo. Sejak itu ia menetap di Jakarta. Sebagai angota Volksraad ia

termasuk angota Fraksi Nasional di bawah pimpinan M.H. Thamrin bersama R.P. Soerooso, Otto Iskandardinata, Sungkono dan Moh. Nur yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dengan kritiknya terhadap pemerintah Kolonial. Pada zaman pendudukan Jepang dengan dilarangnya partai-partai politik, Sukardjo memusatkan perhatiannya kepada jurnalistik. Ia memimpin surat kabar "Asia Raya" yang mempunyai oplah terbesar waktu itu. Pada 1943 ia diangkat menjadi ketua muda Jawa Shinbun Kai, yaitu gabungan atau perserikatan surat kabar di Jawa. Sesudah Indonesia merdeka ia menjadi anggota "Yayasan Dharma" yang menerbitkan majalah "Mimbar Indonesia di Jakarta". Majalah M.I. itu menjadi salah satu benteng pertahanan Republik Indonesia di Jakarta yang sudah diduduki Belanda. Sukardjo Wiryo-pranoto diangkat pula menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Setelah itu ia tercatat sebagai Anggota KNIP pleno keenam.

### **337. Siti Sunaryati Sukemi Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama**

Pada awalnya ia dipanggil dengan nama Sudarawerti, namun karena ia sering sakit-sakitan digantilah namanya menjadi Sunaryati. Perempuan Kelahiran Tuban pada tanggal 25 Desember 1907 ini lahir dikeluarga



pejuang. Kakak tertuanya merupakan tokoh pergerakan dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, yang memberikan pandangan kepada Sunaryati mengenai Indonesia kedepannya. Selain itu, Ketika ia mengikuti Cursus Hulp Acte dari tahun 1926-1928 di Yogyakarta, ia tinggal di rumah keluarga Ki Hajar Dewantara yang juga memberikan pengaruhnya kepada Sunaryati

kecil. Setelah lulus kursus, ia menjadi guru di Taman Siswa Yogyakarta

hingga tahun 1942. Semasa Muda Sunaryati telah menjadi Anggota dari Kongres Perempuan Indonesia bersamaan dengan ia menjadi guru. Setelah Kemerdekaan Indonesia, ia langsung menjadi Anggota KNIP dan langsung dilantik oleh Presiden Soekarno.

**358 Wachid Hasyim Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945**



Dilahirkan di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 1 Juni 1914, sejak kecil Wahid hidup di lingkungan pesantren. Ayahnya, K.H. Hasjim Asy'ari, adalah pahlawan nasional dan tokoh paling terkemuka dari Nahdlatul Ulama (NU). 1932, Wahid berangkat ke Makkah. Bersama sepupunya, di kota suci itu ia memahirkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Orang-orang Makkah kagum akan kemahiran bahasa Arab Wahid. Menurut catatan Tempo dalam Wahid Hasyim: Untuk Republik dari Tebuireng (2011), ia malah telah menguasai dua bahasa asing pada usia 15 tahun. Ia juga seorang pembaca yang lahap, termasuk rajin membaca sejumlah media seperti Penjebar Semangat, Daulat Rakyat, dan Pandji Pustaka. Sementara dari luar negeri, ia membaca Ummul Qura, Shautul Hijaz, Al-Latha'iful, dan lain-lain. Setelah pulang dari Makkah pada 1933, Wahid mengajar di Pondok Pesantren Tebuireng. Karena bacaannya luas, ia

berpikir untuk mengadakan pembaruan dalam pendidikan di pesantren. Setelah kemerdekaan, ia tercatat menjadi Anggota KNIP dan Menteri Agama Republik Indonesia

### 531. Liem Koen Hian **Sidang risalah BPUPKI dan KNIP**

Tokoh kelahiran Banjarmasin ini lahir di Banjarmasin pada tahun 1896 dari keluarga yang berasal dari China. Semasa kecil ia belajar di sekolah dasar Belanda, setelah itu ia belajar otodidak dan berhasil masuk Sekolah hukum

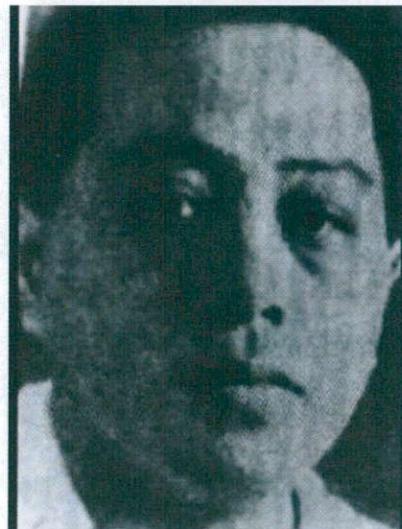


(Sumber: DTBP DKI Jakarta)

di Jakarta. Semasa muda ia menjadi ketua dewan direksi dari koran yang berpatokan ke cina seperti Tjhoen Tjhioe (1915-1916), Sao Lim Po (1917), Sinar Sumatra (1918-1921) dan Pewarta Surabaya (1921-1925). Selanjutnya, ia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, namun sayang ketika Gerakan Rakyat Indonesia membuka keanggotaan bagi kaum peranakan Cina, ia meninggalkan PTI dan ikut ke Gerindo. Di tahun 1938 ia membuat buku yang menentang imperialisme Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia,

ia ditahan oleh Jepang untuk sementara sebelum akhirnya dilepaskan. Ketika Kemerdekaan Indonesia ia menjadi salah satu dari empat wakil golongan cina di BPUPKI dan menjadi Anggota KNIP hingga pleno keenam. Namun di tahun 1951 ia ditahan oleh pemerintah dibawah perdana menteri Soekiman dengan tuduhan menjadi agen RRC, karena ada tendensi mulai kembali berpatokan ke cina. Setelah dibebaskan pun ia menolak kewarganegaraan Indonesia hingga akhir hayatnya di Medan. Ia menjadi salah satu tokoh pergerakan yang tidak memegang kewarganegaraan Indonesia.

535. Yap Tjwan Bing **Sidang risalah BPUPKI dan KNIP**



Lahir di Solo pada tanggal 31 Oktober 1910. Semasa kecil ia sekolah di HIS, MULO dan AMS. Di tahun 1941 ia lulus dari Universiteit van Amsterdam dengan jurusan farmasi. Setelah itu ia menjadi pengelola Apotik Soeniaraja hingga masa kemerdekaan. Ia pun tercatat menjadi salah satu Anggota BPUPKI dan Anggota KNIP pleno ke-enam.

## **Lampiran Sejarah KNIP dan Sejarah Museum Sejarah Museum DPR RI**

Sejak masa KNIP (tahun 1945) sampai dengan DPR RI periode 2014 - 2019, DPR RI telah mengalami 18 periode. Tiap periode memiliki latar belakang, sejarah politik, jumlah anggota ,jumlah Fraksi dan kinerja yang berbeda. Kilas balik perjalanan DPR RI mulai tahun 1945 (saat pelantikan pertama kali Anggota KNIP) inilah yang akan diusahakan dapat divisualisasi dalam "MUSEUM DPR-RI". Prakarsa pembuatan Museum DPR RI dimulai pada periode DPR 1987 - 1992 dengan Pimpinan DPR-RI saat itu: M. Kharis Suhud sebagai Ketua, R. Soekardi Sebagai Wakil Ketua, Saiful Sulun sebagai Wakil Ketua, Dr.HJ.Naro,S H sebagai Wakil Ketua. Realisasi pembuatan Museum DPR RI yaitu dengan membentuk Yayasan dengan nama "Yayasan Museum DPR-RI dengan ketuanya Bapak Jailani (Jhony) Naro ,S H. Langkah awal yang dilakukan oleh Yayasan Museum adalah membuat perencanaan pembangunan Gedung Museum DPR RI dan membentuk Tim Museum DPR RI yang bertugas mengadakan studi banding ke Parlemen Luar Negeri dan mengumpulkan koleksi-koleksi baik berupa naskah, barang dan foto yang berkaitan dengan parlemen jaman penjajahan sampai dengan proses pembentukan KNIP serta kegiatan-kegiatan DPR-RI mulai tahun 1945. Koleksi yang terkumpul berupa barang, naskah dan foto kemudian ditempatkan di ruang serbaguna lt.2 gedung Nusantara IV (posisi sekarang di lt.2 gedung Nusantara) dan ditandai dengan penandatanganan Prasasti Peresmian Museum DPR RI oleh Ketua DPR-RI, Bapak M.Charis Suhud.

## **KNIP**

Walaupun KNIP hanya bertahan selama 5 tahun, bukanlah berarti kecil sumbangsihnya bagi Indonesia. Selama itu KNIP telah melakukan 6 kali sidang di berbagai tempat.

1. Jumlah Anggota ketika pertama kali dilantik ada sekitar 60 orang, terdiri dari wakil-wakil masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Diantaranya terdiri dari bekas anggota PPKI. Sidang Pertama dilakukan di Gedung Kesenian pada tanggal 29 Agustus 1945 dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Hasil yang dihasilkan diantaranya Janji anggota KNIP, Mosi Rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta menyempurnakan kemerdekaan Indonesia dan Maklumat tentang kewajiban Rakyat Indonesia untuk mendukung Pemerintah.
2. Sidang Kedua dilakukan pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Jakarta bertempat di Gedung Balai Muslimin menghasilkan Badan Pekerja, yang bertugas untuk melaksanakan tugas KNIP. Ketua KNIP pada saat itu adalah Sutan Sahrir. Mengusulkan diadakannya pembagian kekuasaan negara yang melahirkan Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 yang memberikan KNIP kekuasaan Legislatif selama belum terbentuknya DPR dan MPR, serta dibentuknya Badan Pekerja KNIP yang melaksanakan tugas KNIP dengan tugas Bersama dengan Presiden membentuk UU dan ikut menetapkan GBHN
3. Sidang Ketiga KNIP terjadi pada 25-27 November 1945 di Jakarta, sekarang digunakan sebagai Gedung Pascasarjana UKI dengan jumlah 132 anggota yang dipimpin oleh Soepeno sebagai ketua sementara. Sidang KNIP ini menghasilkan keputusan penting yaitu mengesahkan keputusan BP-KNIP tentang pembentukan partai-partai politik, menyempurnakan susunan KNIP, hingga perubahan kabinet Syahrir. Selain itu, dalam Sidang Ketiga KNIP, Pemerintah atas nama rakyat menyatakan:

- Pernyataan terim kasih kepada Dewan Negara Ceylon atas simpatinya terhadap Perjuangan Indonesia
- Pernyataan kepada rakyat dan pemerintah Australia atas bantuannya
- Pernyataan Protes terhadap tindakan-tindakan tentara Inggris serta anjuran kepada Pemerintah agar mengusahakan penarikan tentara Inggris kepada PBB dan penyelesaian pertikaian politik Indonesia di hadapan wakil-wakil PBB.

4. Sidang Keempat KNIP terjadi 28 Februari- 3 Maret 1946 di Sitihinggil Solo, dengan jumlah 203-225 anggota. Salah satu hasil rapatnya adalah keinginan anggota KNIP untuk mengadakan pembaharuan dalam tubuh KNIP, sehingga pada 29 April 1946 Pemerintah menetapkan anggota KNIP berjumlah 200 orang. Sementara posisi ketua dipegang oleh Mr. Asaat hingga sidang ke-6

5. Sidang Kelima KNIP terjadi pada tanggal 25 Februari- 6 Maret 1947 di Societit Concordia Malang. Sidang ini salah satunya menghasilkan keputusan penting yaitu penolakan anggota KNIP terhadap Perjanjian Linggarjati yang akan diadakan pada 25 Maret 1947. Jumlah anggota KNIP Sidang Kelima mencapai 407 orang setelah Presiden mengeluarkan peraturan tentang penyempurnaan KNIP pada tanggal 29 Desember 1946.

6. Sidang Keenam 6-15 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta. Perubahan susunan KNIP selanjutnya kembali terjadi dengan keluarnya Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 28 November 1949 dengan pertimbangan bahwa beberapa partai belum mempunyai perwakilan dalam KNIP dan sebelum dibentuknya DPR, partai-partai tersebut perlu menempatkan wakil-wakilnya dalam KNIP agar semua elemen dalam

masyarakat bisa tersampaikan aspirasinya. Pada akhirnya, total anggota KNIP pada saat itu berjumlah 536 orang. Persetujuan terhadap hasil-hasil KMB

#### Indonesia Multipartai

Sebagai respon atas Maklumat no. X, pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai politik dengan harapan bisa mewakili seluruh aspirasi masyarakat dan diharapkan bisa melakukan Pemilu diawal tahun 1946, namun tidak terlaksana. Ini disambut hangat oleh masyarakat Indonesia, terlihat dengan munculnya partai PKI dan Masyumi pada tanggal 7 November 1945, Partai Buruh Indonesia pada tanggal 8 November, Parkindo dan Partai Sosialis Indonesia pada tanggal 10 November, Partai Rakyat Sosialis pada tanggal 20 November.

Kemunculan partai-partai baru tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 8 Desember munculah Partai Katholik Republik Indonesia, pada tanggal 17 Desember terjadi pleburan 2 Partai aliran Sosialis yaitu Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis menjadi Partai Sosialis, disusul Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia yang melebur menjadi Partai Nasional Indonesia pada tanggal 29 Januari 1946.

#### Quotes Indonesia Berparlemen BPUPKI

Soepomo mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui MPR

Salah satu pentingnya keberadaan parlemen disampaikan oleh M. Yamin melalui usulan dasar negaranya yang terdapat dalam sila keempat, yaitu Peri Kerakyatan yang berisi Permusyawaratan, Perwakilan, dan Kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengatakan bahwa pentingnya

bermusyawarah wakil-wakil masyarakat dari seluruh Indonesia dengan mengedepankan rasionalisme.

Hal yang serupa disampaikan oleh Soepomo, ia mengatakan bahwa untuk menjamin bahwa Kepala Negara terus mewakili kepentingan rakyat, diperlukanlah suatu sistem Badan Permusyawaratan sebagai cara Kepala Negara bisa mengetahui aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh wakil rakyat yang duduk di badan tersebut.

Soekarno menyampaikan aspirasi melalui usulan sila ketiganya, yaitu Mufakat/demokrasi. Ia mengatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah dasar perwakilan dan permusyawaratan, Karena kita akan membentuk suatu negara dimana "semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu".

Oei Tjong Hauw menyetujui apa yang dikatakan oleh Yamin, namun ia menambahkan usulah bagaimana cara rakyat dapat memilih para wakilnya di pemerintahan.

KNIP sendiri pada saat itu memiliki 6 Seksi/Komite, yaitu

1. Seksi Luar Negeri memperhatikan urusan Kementerian Luar Negeri
2. Seksi Dalam Negeri memperhatikan
  - A. Kementerian Dalam Negeri
  - B. Kepolisian
  - C. Minoriteiten
  - D. Kementerian Kehakiman
3. Seksi Pembangunan memperhatikan urusan kementerian- kementerian
  - A. Kemakmuran
  - B. Keuangan
  - C. Perburuhan

D. Pekerjaan Umum

E. Sosial

F. Negara PPBM

4. Seksi Penerangan memperhatikan Kementerian Penerangan

5. Seksi Pertahanan Negara memperhatikan urusan Kementerian Kementerian

A. Pertahanan

B. Negara

C. Pemuda

6. Seksi Kemasyarakatan memperhatikan urusan Kementerian kementerian

A. Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan

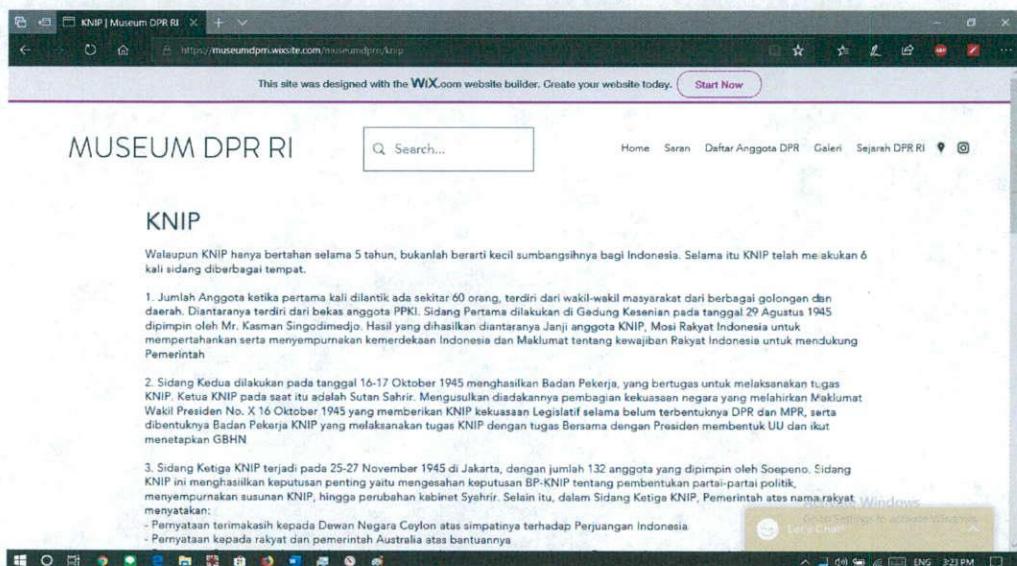
B. Kesehatan

C. Agama

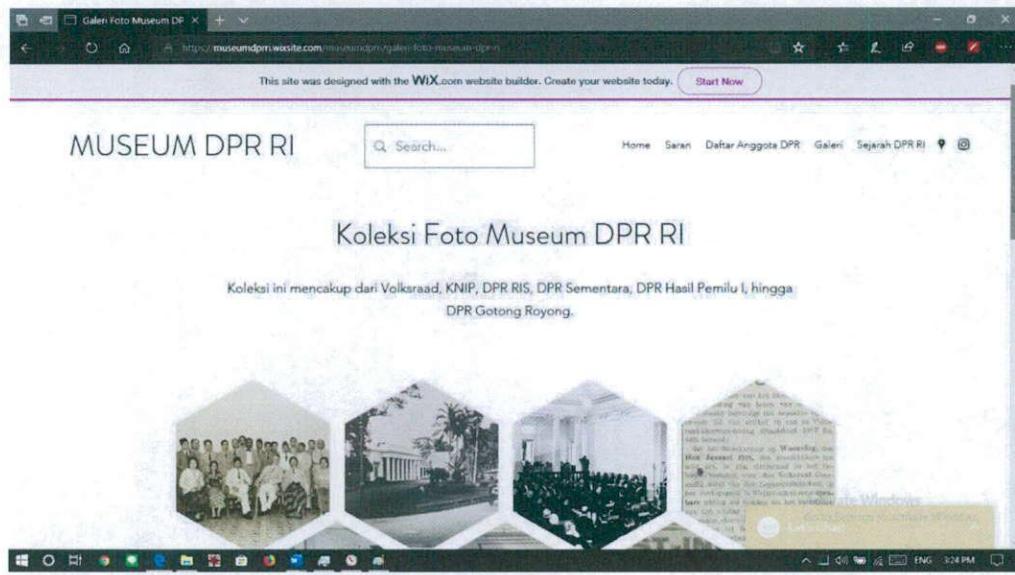
## Lampiran Tampilan Situs Dummy Museum



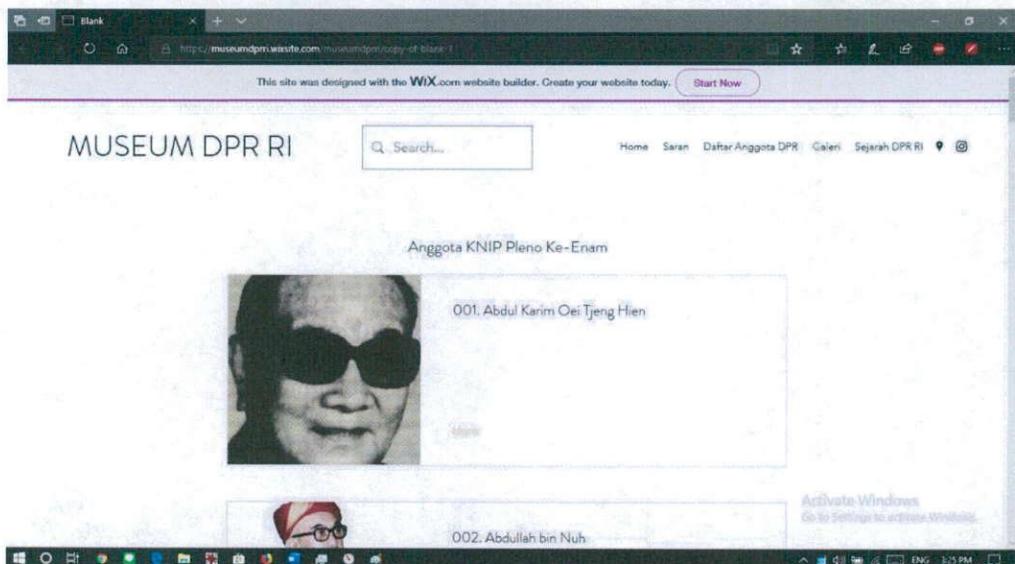
Tampilan halaman utama rancangan situs museum



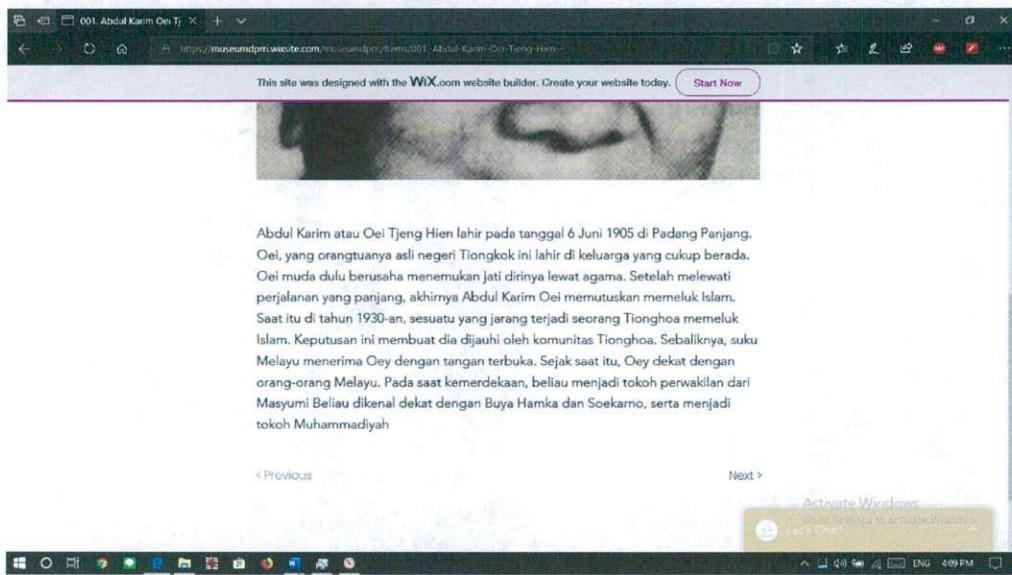
Tampilan halaman sejarah KNIP



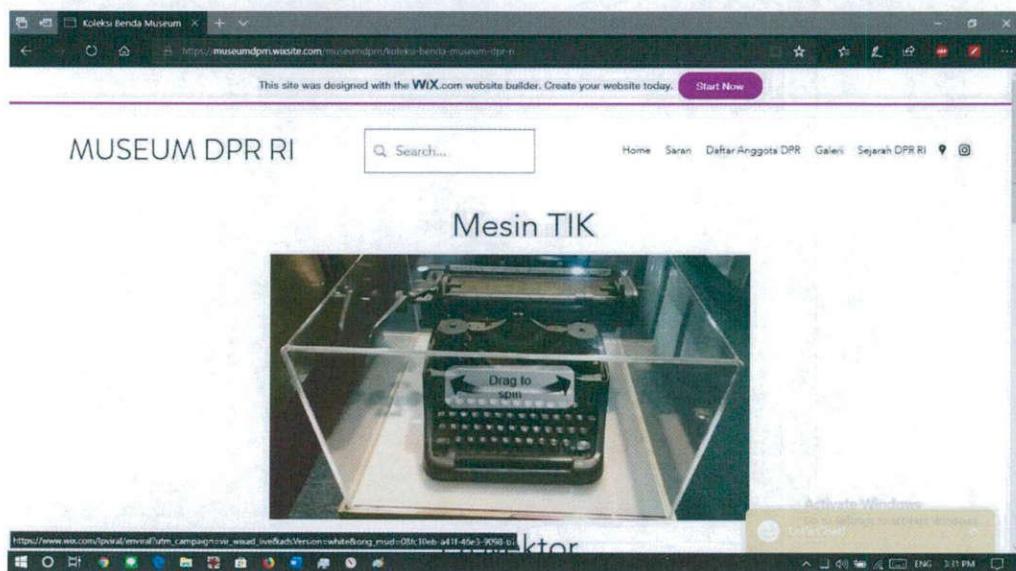
Tampilan halaman koleksi foto Museum DPR RI



Tampilan database anggota KNIP



## Tampilan tokoh dalam database KNIP



## Tampilan foto koleksi museum interaktif

### **Lampiran Hasil Survei Uji Coba Situs**

Survei yang mendapatkan 7 responden ini dilakukan saat siang hari hingga malam hari dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tampilan website museum secara keseluruhan?
2. Bagaimana tampilan halaman koleksi anggota KNIP?
3. Bagaimana tampilan halaman sejarah KNIP?
4. Bagaimana tampilan halaman koleksi foto DPR RI?
5. Bagaimana isi konten yang ditampilkan di setiap masing masing halaman?
6. Apa yang kurang dari Website ini?

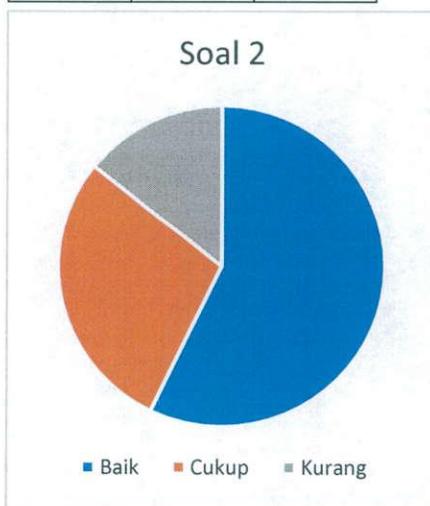
Tujuh responden tersebut dengan pilihannya adalah sebagai berikut, dengan angka 1 sebagai baik, 2 sebagai biasa, dan 3 sebagai kurang

No.	Nama	Asal Instansi	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5
1	Pak Mardana	Bidang Arsip dan Museum	2	2	3	3	2
2	Pak Suhari	Bidang Arsip dan Museum	1	1	2	1	2
3	Nala	Bidang Arsip dan Museum	1	1	1	1	1
4	Arum	Bidang Arsip dan Museum	1	1	1	1	1
5	Sasmito	Bidang Data dan Teknologi Informasi	3	3	3	3	3
6	Daniel	Bidang Data dan Teknologi Informasi	1	1	1	1	1
7	Gamal	Luar Sekjen dan BK DPR RI	2	2	2	2	3

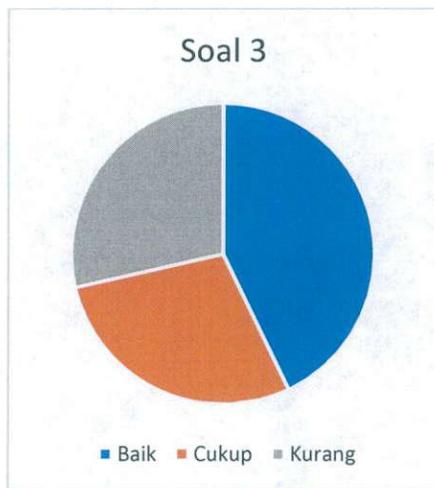
soal 1	Baik	4
	Cukup	2
	Kurang	1
soal 2	Baik	4
	Cukup	2
	Kurang	1
soal 3	Baik	3
	Cukup	2
	Kurang	2
soal 4	Baik	4
	Cukup	1
	Kurang	2
soal 5	Baik	3
	Cukup	2
	Kurang	2



Untuk soal pertama, sebanyak 4 orang sudah menilai rancangan situs ini sudah baik, 2 orang menilai ini sebagai cukup, sedangkan 1 orang menilai rancangan ini masih kurang secara keseluruhan



Untuk soal kedua, sebanyak 4 orang sudah menilai rancangan situs ini sudah baik, 2 orang menilai ini sebagai cukup, sedangkan 1 orang menilai rancangan ini masih kurang



Untuk soal ketiga, sebanyak 3 orang sudah menilai rancangan situs ini sudah baik, 2 orang menilai ini sebagai cukup, sedangkan 2 orang menilai rancangan ini masih kurang.



Untuk soal keempat, sebanyak 4 orang sudah menilai rancangan situs ini sudah baik, 1 orang menilai ini sebagai cukup, sedangkan 2 orang menilai rancangan ini masih kurang.



Untuk soal ketiga, sebanyak 3 orang sudah menilai rancangan situs ini sudah baik, 2 orang menilai ini sebagai cukup, sedangkan 2 orang menilai rancangan ini masih kurang.

Untuk bagian berikan kesan dan saran setiap orang memberikan respon yang berbeda. Pak Mardana mengatakan bahwa masih banyak yang bisa ditingkatkan seperti dalam foto berikan caption 5w 1h. Lalu ada Pak Suhari yang memberikan saran yaitu didalam pembuatan situs museum DPR-RI diupayakan untuk kontennya agar koleksi-koleksi sejarah perjalanan perpolitikan Indonesia produk-produk DPR-RI dari zaman ke zaman agar dimuat. Sementara teman saya Nala hanya memberikan sepatah kata yaitu tingkatkan. Teman saya Arum secara garis besar menginginkan adanya peningkatan konten dan informatif.

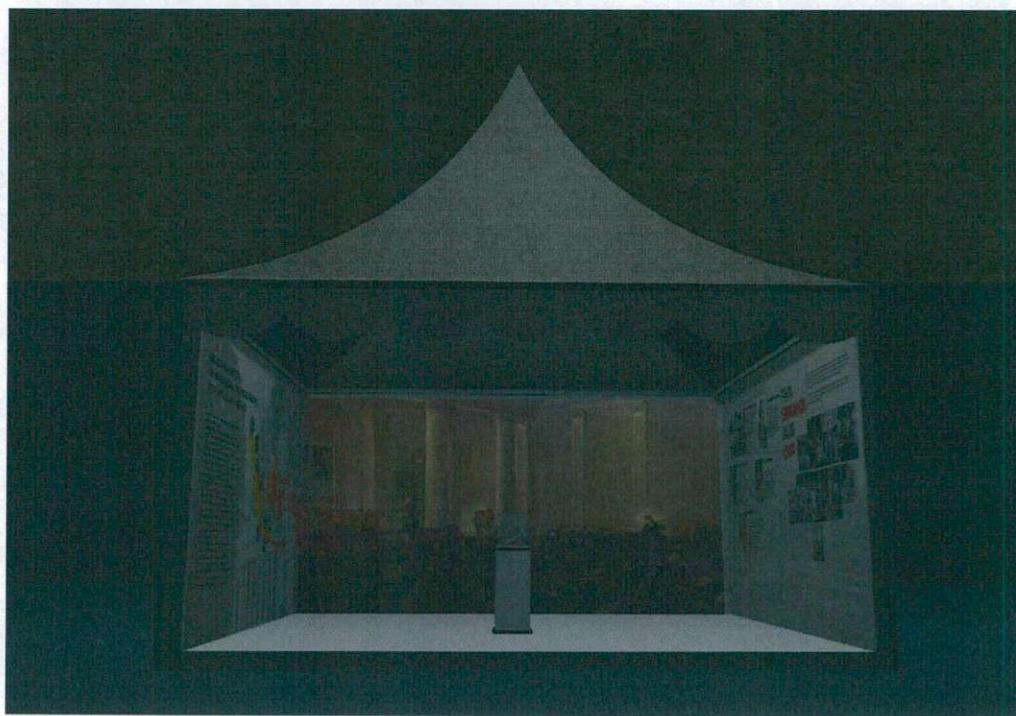
Teman saya dari BDTI, Sasmito memberikan saran yang konstruktif, seperti jangan ada halaman kosong dan template website terlalu putih, Daniel juga memberikan saran untuk ada penambahan logo di halaman depan, peningkatan kualitas foto yang ditampilkan, serta font jadwal jam diperbesar, Lalu ada Gamal yang memberikan bahwa nomor untuk menghubungi musuem satu kali aja di halaman, penambahan logo museum, peningkatan kualitas foto menjadi HD, serta mengembangkan konten sejarahnya

Hasil Survei secara keseluruhan menyambut baik akan adanya prototype situs museum ini. Dari segi tampilan, masih banyak yang bisa di tingkatkan, seperti foto resolusi tinggi untuk halaman utama, penambahan logo, dan template situs yang terlalu putih.

## Lampiran Desain Pameran Kota Tua



Tampilan desain bagian Wanita dalam KNIP



Tampilan Desain Booth secara keseluruhan

## Lampiran Kartu Kendali Proses Pembimbingan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**MENTOR**

### KARTU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN..... TAHUN 2019

Nama : NPF Sulthan Aiff Alyam  
Instansi : Serjen & BK DPR RI  
NIP. : 19861225 2010 07 1001

Nama Mentor:  
Endang Suryasari, S.H., M.Si.

No	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	28 - November 2019	Isu mengenai MAM yang belum diketahui diterbitkan	Langsung	Pertemuan ke KAHIP	A. Ak -
2	9 - Oktober 2019	Pelajaran DRAFT sistem	Langsung	Latihan teknis langsung sebagai Mentor teknis sistem DRAFT	F. Habs -
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst				

(\*) Pembimbingan yang sah  
adalah pembimbingan yang  
ditandatangani oleh Mentor

KARTU KENDALI  
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH  
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....  
TAHUN 2019

Nama : Nur Sabtu Alfie Abyan      Nama Coach : Dr. Shanty Iman Wijaya, ST, MM,  
Instansi : Setjen & BK DPR RI  
NIP : 199512272010051001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	4-9-2019	Tujuan tsntan	Langsung	Lanjutkan pertemuan selanjutnya Agar selanjutnya dapat dilakukan	
2	20-9-2019	prngkwl drt	Langsung	Agar selanjutnya dapat dilakukan	
3				Menulis kag diklksn di tsntan	
4	27-9-2019	kag sasaygcca	Langsung	Ortu wtrsl Rano, agar Elisa diklksn	
5	4-10-2019	Laporan	Langsung	Agar laporan terpenuhi di tsntan	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Dst..				

(\*) Pembimbingan yang sah  
adalah pembimbingan yang  
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

**KARTU KENDALI**  
**PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA**  
**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....**  
**TAHUN 2019**

Nama : NUR Sulhan Alif Alyan                          Nama Coach : Dr. Shanty Irmawati, ST., MM,  
Instansi : Setjen & BK DPR RI  
NIP : 19961225 2019 03 1001

No	Tanggal Pembimbingan	Isti Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	4-9-2019	Tujuan Legislatif	Langsung	Lengkap dan baik-baik tidak ada kekurangan	Dsp
2	20-9-2019	Perangungan dosen	Langsung	- Agar selanjutnya dilakukan study lebih banyak - Tingkat kesiapan diketahui lebih baik	Dsp
3					
4					
5	27-9-2019	Kesiap siap	Langsung	Belum terlalu agresif dikembangkan	Dsp
6	4-10-2019	Laporan	Langsung	Terdapat waktu/pagu sisa	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst.				

(\*) Pembimbingan yang salah  
adalah pembimbingan yang  
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

## Lampiran Saat Pengujian Rancangan Aktualisasi

### Formulir 9

#### PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III

Nama Peserta : **Nur Sa'ban Alif Abyan, S.Hum.**  
Jabatan : Pamong Budaya Pertama  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tempat Aktualisasi : Bidang Arsip dan Museum

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

**Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu**

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyaji mampu dan sangat memahami materi dan masalah Robert Museum DPR RI
- Pada substansi merupakan Redaksional kalimat dalam Penulisan isu

Bogor, 26 Agustus 2019

Mentor,



Endang Suryastuti, S.H., M.Si.  
NIP. 196908011994032001

Formulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA DALAM MEMBUAT  
RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III

Nama Peserta : Nur Sa'ban Alif Abyan, S.Hum.  
Jabatan : Pamong Budaya Pertama  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tempat Aktualisasi : Bidang Arsip dan Museum

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

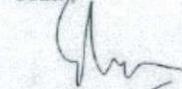
Sangat Mampu/Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- / Dasar hukum dibungkalkan
- / Revisi judul, objeksi, digantikan  
*kelebihan dan kekurangan*

Bogor, 26 Agustus 2019

Coach,



Dr. Shanty Irma Idrus, ST, MM  
NIP.197803282010012012

Nama Peserta                    **Nur Sa'ban Alif Abyan, S.Hum.**  
Nomor Daftar Hadir            32  
Jabatan                          Pamong Budaya Pertama  
Instansi                         Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**Catatan/Saran:**

1. Penulisan Peraturan dari buku mesti di sempurnakan dan terhindari peraturan yg terkait dg permasalahan.
2. Penyelesaian jadwal menjadi "Pembuatan Dury Rancangan Situs"
3. cat pdt branya sampai Dury Rancangan situs.
4. Penyelesaian tahapan di kalka dg nilai nilai ANERCA dan WOG
5. Kegiatan yg dilakukan belum ada di kisi kerjanya artinya rancangan skripsi termasuk invisi yg baru, meskipun punya dilakukan penyelesaian.

Bogor, 26 Agustus 2019

Penguji,



Rusmanto, S.H., M.H.  
NIP.197112121997031001

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA  
DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI**

Nama Peserta : **Nur Sa'ban Alif Abyan, S.Hum.**  
Jabatan : Pamong Budaya Pertama  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tempat Aktualisasi : Bidang Arsip dan Museum

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

**Sangat Mampu/Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu**

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Semua tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan
- Dokumentasi kegiatan/foto dalam laporan adalah foto yang berwarna
- Output dummy telah dapat dihasilkan

Bogor, 10 Oktober 2019

Coach,

  
Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.  
NIP.197803282010012012

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA  
DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI**

Nama Peserta : **Nur Sa'ban Alif Abyan, S.Hum.**  
Jabatan : Pamong Budaya Pertama  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tempat Aktualisai : Bidang Arsip dan Museum

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

**Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu**

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mampu menyajikan materi dengan baik
- Perlu siklus ulangan lagi untuk konten yg .

Bogor, 10 Oktober 2019

Mentor,



Endang Suryastuti, S.H., M.Si.  
NIP.196908011994032001